

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN DALAM
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI KECAMATAN
BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

Oleh :

AFRINALDI
NPM : 177310393

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : AFRINALDI

NPM : 177310393

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : S1

Judul UP : Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Petani, Desa Buluh Manis Dan Desa Air Kulim Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

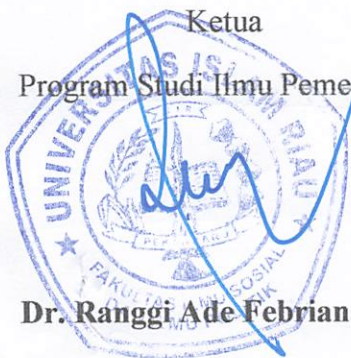
Format sistematika dan pembahasan materi masing - masing bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan - ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 07 juni 2021

Turut Menyetujui:

Ketua

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing

Dra. Hj. Monalisa, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Afrinaldi
NPM : 177310393
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi secara keseluruhan Dinilai Relatif telah memenuhi Ketentuan-Ketentuan metode penelitian Ilmiah, Oleh karena itu Tim Penguji Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana.

Pekanbaru, 07 Juni 2021

Ketua

Sekretaris



Dra. Hj. Monalisa, M.Si

Septa Juliana, S.Sos, M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Anggota



Indra Syafri, S.Sos, M.Si

Budi Muliando, S.IP, M.Si

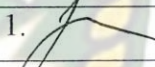


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 030 /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 21 April 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 22 April 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Afrinaldi
NPM : 177310393
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian dalam Pemebrdayaan Kelompok tani di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.**

Nilai Ujian : Angka : " 83.47 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Budi Muliando, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 22 April 2021
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I/Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 030/ UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Afrinaldi
N P M : 177310393
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian dalam Pemebrdayaan Kelompok tani di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.**

Struktur Tim :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dra. Hj. Monalisa, M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Septa Juliana, S.Sos., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Budi Mulianto, S.IP., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 April 2021
Dekan,
Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Afrinaldi
NPM : 177310393
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 07 Juni 2021

An. Tim Penguji

Sekretaris

Ketua

Dra. Hj. Monalisa, M.Si

Septa Juliana, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I

Indra Syafri, S.Sos, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah tiada kata dan ucapan yang pantas penulis ungkapkan melainkan pujian dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah yakni Nabi Besar Muhammad SAW, dengan ucapan “Allahumma Sholli’alaa Muhammad Wa’alaa Alihii Syayidina Muhammad”.

Adapun judul dari skripsi ini yaitu “Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis”. Skripsi ini penulis tulis dan di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya memaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal tersebut penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, ucapan terimakasih ini penulis sampaikan:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. **Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. **Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si** selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. **Bapak Andryius S.Sos., M.Si** selaku Sekretaris Prodi Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan pada penulis dan menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. **Ibu Dra. Hj. Monalisa, M.Si** selaku Pembimbing yang telah memfasilitasi dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Para Bapak dan Ibu Dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis baik dilingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
7. Bapak kepala Tata Usaha beserta seluruh Staf pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administrasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.
8. Terkhusus dan teristimewa ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada kedua Orangtua tercinta Amrillazi S.H dan Nurhasanah, yang selalu memberikan dukungan penulis baik dari segi moral, materil maupun doa - doanya sehingga penulis dapat mudah dalam menyelesaikan proposal ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman seperjuangan Abdul Rahman Hadi, Teguh Pradana, Muhammad Sobri, Ratna Julita, Fajar, Irfan Ramanda S.T dan seluruh kelas IP B angkatan 2017 dan orang-orang terdekat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan, semangat dan motivasi.
10. Dan kepada seluruh yang terlibat baik dalam mendukung maupun memberi sarananya kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebut di atas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Amin... Akhirnya penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Pekanbaru, 07 Juni 2021

Penulis,



AFRINALDI



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan	
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	15
2. Konsep Pemerintahan	18
3. Konsep Evaluasi.....	22
a. Teori Efektivitas.....	25
b. Teori Efisiensi.....	26
c. Teori Responsivitas.....	27
d. Teori Ketepatan.....	28
e. Teori Kecukupan.....	29
f. Teori Perataan.....	29
4. Konsep Kinerja	31
5. Konsep Pemberdayaan.....	33
6. Konsep Penyuluhan.....	34
B. Penelitian Terdahulu	36

C. Kerangka Pikir.....	39
D. Konsep Operasional.....	40
E. Operasional Variable.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	48

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis.....	49
B. Gambaran Umum Kecamatan Bathin Solapan.....	51
C. Sejarah UPT Balai Penyuluh Pertanian.....	54
D. Struktur Organisasi.....	55
E. Tugas UPT Balai Penyuluh Pertanian	56
F. Visi dan Misi UPT Balai Penyuluh Pertanian.....	58

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan.....	59
1. Jenis Kelamin Informan.....	59
2. Umur Informan	60
3. Jenis Pekerjaan Informan.....	60
B. Dimensi Efektivitas.....	61
C. Dimensi Efisiensi	64
D. Dimensi Kecukupan.....	67
E. Dimensi Pemerataan.....	70
F. Dimensi Responsivitas.....	73
G. Dimensi Ketepatan.....	76

H.Hambatan-Hambatan dalam Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	80
--	----

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	----

LAMPIRAN	89
-----------------------	----

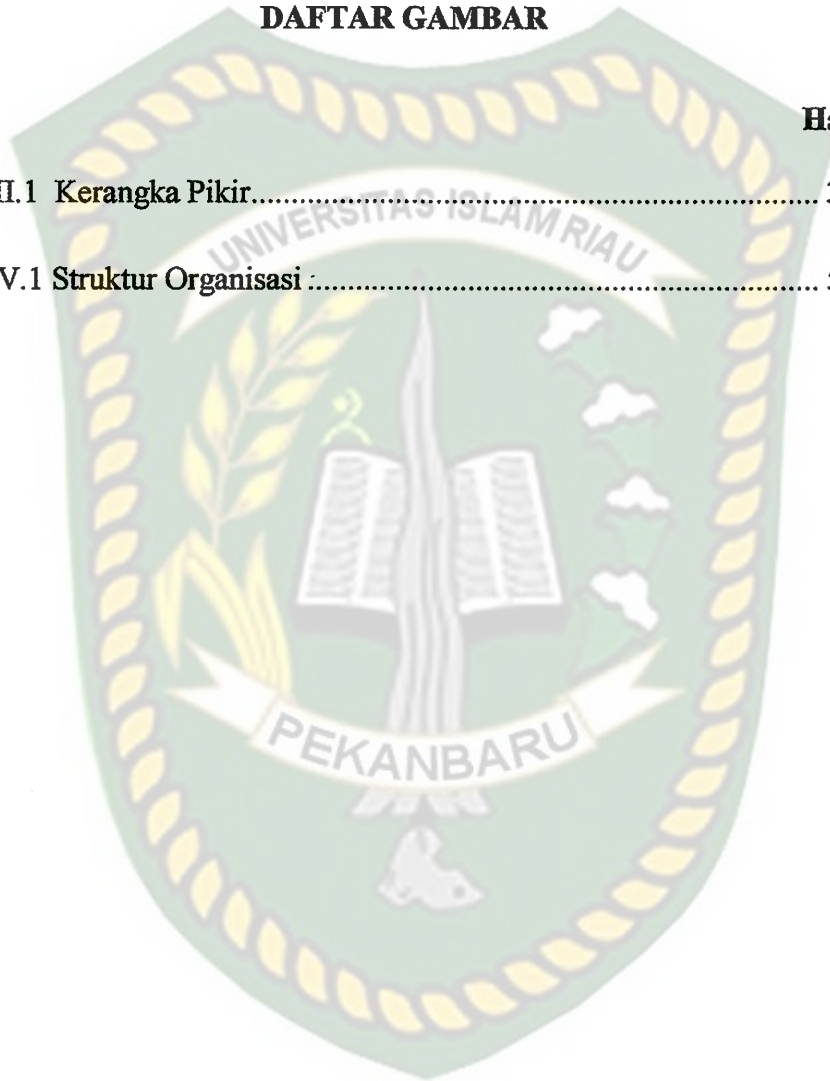


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel I.1 Jumlah Desa Dan Jumlah Kelompok Tani Di Kecamatan Bathin Solapan.....	11
Tabel I.2 Jumlah Kelompok Tani Tahun 2020.....	12
Tabel I.3 Jumlah Kunjungan Penyuluh Pertanian 2020.....	13
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel II.2 Operasional Variable.....	42
Tabel III.1 Informan Dan Key Informan.....	44
Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	48
Tabel IV.1 Luas wilayah desa.....	52
Tabel IV.2 Data jumlah penduduk.....	53
Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
Tabel V.2: Umur Informan.....	60
Tabel V.3 Jenis Pekerjaan Informan.....	61

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pikir.....	39
Gambar IV.1 Struktur Organisasi :.....	55



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Peserta Ujian Seminar Proposal yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AFRINALDI
NPM : 177310393
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : S1

Judul Ujian Komprehensif: Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Petani, Desa Buluh Manis Dan Desa Air Kulim Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian komprehensif beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah - kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, seluruh persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 07 Juni 2021



AFRINALDI

EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS

ABSTRAK

AFRINALDI

Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja, Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional sangat penting dan strategis. Hal ini terutama karena sektor pertanian masih memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk yang ada di pedesaan dan menyediakan bahan pangan bagi penduduk. Kecamatan Bathin Solapan merupakan salah satu daerah yang wilayahnya termasuk kawasan pertanian di kabupaten bengkalis yang pada umumnya berprofesi sebagai petani. Sebagian petani Kecamatan Bathin Solapan termasuk sebagai penerima bantuan pupuk subsidi dari pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dalam hal ini, kinerja penyuluh pertanian sangat di harapkan agar semua kelompok tani khususnya di 3 desa binaan yaitu Desa Petani, Desa Buluh Manis, dan Desa Air Kulim bisa mendapatkan bantuan pupuk subsidi dari pemerintah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja penyuluh pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani di kecamatan bathin solapan. Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian dilakukan pengumpulan data melalui Wawancara, Pengamatan dan Dokumentasi dan penelitian ini dilakukan di 3 desa, yaitu didesa petani, desa buluh manis, dan desa air kulim. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif. Indikator dari penelitian ini adalah yaitu indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, ketepatan, dan responsivitas. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kinerja penyuluh pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Bathin Solapan kurang baik dan efektif, karena luasnya wilayah binaan dan banyak nya kelompok tani yang dibina membuat seorang penyuluh pertanian menjadi kewalahan dalam memberi arahan dan masukan kepada kelompok tani khususnya di 3 desa tersebut.

PERFORMANCE EVALUATION OF AGRICULTURAL PENYU LUH IN EMPOWERMENT OF TANI GROUP IN BATHIN SOLAPAN SUB- DISTRICT, BENGKALIS DISTRICT

ABSTRACT

AFRINALDI

Keywords: Evaluation, Performance, Agricultural Extension, Farmer Group

The role of the agricultural sector in the national economy is very important and strategic. This is mainly because the agricultural sector still provides employment for most of the population in rural areas and provides food for the population. Bathin Solapan Subdistrict is one of the areas whose territory is an agricultural area in Bengkalis Regency which generally works as a farmer. Some of the farmers in Bathin Solapan Subdistrict are recipients of subsidized fertilizer assistance from the Bengkalis Regency government. In this case, the performance of agricultural extension is highly expected so that all farmer groups, especially in the 3 assisted villages, namely Farmers Village, Buluh Manis Village, and Air Kulim Village, can get subsidized fertilizer assistance from the government. The purpose of this study was to determine the performance of agricultural instructors in empowering farmer groups in the sub-district of Inner Solapan. Selection of informants as the source of research data using purposive sampling technique. The research was carried out by collecting data through interviews, observation and documentation and this research was carried out in 3 villages, namely the farmer village, buluh manis village, and air kulim village. In this research, the descriptive method is used, namely the collected data is classified according to its type and form and then presented descriptively. The indicators of this study are indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, accuracy, and responsiveness. The results of the study concluded that the performance of agricultural extension agents in empowering farmer groups in Bathin Solapan District was not good and effective, because the size of the target area and the large number of farmer groups being fostered made an agricultural extension worker overwhelmed in providing direction and input to farmer groups, especially in the 3 villages.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris yang memiliki kekayaan alam yang banyak dan beragam, menjadikan pertanian sebagai salah satu sektor paling strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Tetapi, sektor pertanian dari era penjajahan sampai dikala ini (perdagangan bebas) belum seluruhnya hadapi kemajuan, perihal ini teruji masih banyaknya bahan pangan yang diimpor dari negeri lain, serta masih rendahnya nilai ubah komoditas pertanian yang berakibat pada rendahnya pemasukan petani. Petani yang pada biasanya mencerna pertanian di pedesaan belum hadapi kesejahteraan, bisa dilihat dari angka kemiskinan di pedesaan lebih besar dibanding di perkotaan.

Seiring dengan terjadinya perkembangan dan dinamika di bidang pemerintahan khususnya pemerintahan daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pada pasal 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa:

- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi

dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

- (3) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Usuran Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pasal 11 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni;

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Usuran Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan
- b. kesehatan
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. pangan
- d. pertanahan
- e. lingkungan hidup
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. perhubungan
- j. komunikasi dan informatika
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. penanaman modal
- m. kepemudaan dan olah raga
- n. statistik
- o. persandian
- p. kebudayaan
- q. perpustakaan
- r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan
- b. pariwisata
- c. pertanian
- d. kehutanan
- e. energi dan sumber daya mineral
- f. perdagangan
- g. perindustrian

h. transmigrasi

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Indonesia telah membagi urusan pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pada pasal 9 dijelaskan beberapa pembagian urusan pemerintahan, seperti urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 11 ayat 1, penelitian ini menggunakan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah yaitu pada sub c tentang sektor pertanian. Hal ini mengafirmasi bahwasanya sektor pertanian menjadi bagian urusan pilihan oleh pemerintah daerah.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), peranan Penyuluh Pertanian menjadi semakin strategis dalam memfasilitasi proses pemberdayaan petani dan keluarganya. Kegiatan penyuluhan pertanian bukan lagi merupakan kegiatan pendidikan tetapi kegiatan pemberdayaan petani dan keluarganya untuk bersedia merubah perilaku mereka yang meliputi perubahan sebagai berikut:

1. Rasionalisme dalam pengambilan keputusan usaha tani selalu didasarkan pada kondisi pasar.
2. Efisiensi pengolahan usaha tani disertai kemitraan petani nelayan dengan pihak swasta.
3. Menumbuh kembangkan Ketahanan Pangan dan Gizi bagi petani dan keluarga.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Penyuluhan

Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan, pada pasal 1 menyebutkan bahwa: Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan Produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluhan pertanian mempunyai pengertian yaitu proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian).

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional sangat berarti serta strategis. Perihal ini paling utama sebab sektor pertanian masih membagikan lapangan pekerjaan untuk sebagian besar penduduk yang terdapat di pedesaan serta menyediakan bahan pangan untuk penduduk. Peranan lain dari sektor pertanian merupakan menyediakan bahan mentah untuk industri serta menciptakan devisa negeri lewat ekspor non migas. Apalagi sektor pertanian sanggup jadi katup pengaman

perekonomian nasional dalam mengalami krisis ekonomi yang menyerang Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir ini.

Keberhasilan pembangunan pertanian bukan cuma ditetapkan oleh keadaan sumber energi pertanian, namun pula ditetapkan oleh kedudukan penyuluh pertanian yang sangat strategis serta mutu sumber energi manusia yang mendukungnya, ialah sumber energi manusia yang memahami dan sanggup menggunakan serta meningkatkan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam pengelolaan sumber energi pertanian secara berkepanjangan.

Kinerja penyuluh pertanian ialah respons ataupun sikap orang terhadap keberhasilan kerja yang dicapai oleh orang secara aktual dalam sesuatu organisasi cocok tugas serta tanggungjawab yang diberikan kepadanya yang dilaksanakan secara efisien serta efektif bersumber pada periode waktu tertentu dalam rangka menggapai tujuan organisasi. Tujuan penyuluhan pertanian merupakan buat meningkatkan kapasitas (keberdayaan) serta kemandirian petani, hingga kinerja penyuluhan merupakan kinerja yang mengacu kepada konsep-konsep pemberdayaan ialah yang sanggup meningkatkan kapasitas (keberdayaan) serta kemandirian petani.

Kinerja penyuluh pertanian dipengaruhi oleh aspek internal serta eksternal penyuluh. Kinerja penyuluh dalam riset ini merupakan dipersepsikan oleh tingkatan kepuasan petani yang menerima jasa penyuluhan pertanian. Aspek internal yang diprediksi mempengaruhi terhadap kinerja penyuluh merupakan kompetensi penyuluh pertanian. Aspek eksternal yang diprediksi mempengaruhi terhadap

kinerja penyuluh merupakan ciri sistem sosial (ialah aspek- aspek yang mendukung/ membatasi pergantian dalam sistem sosial selaku akibat proses intervensi pembangunan pertanian) (Marliati et al. 2008)

Berdasarkan pada peraturan menteri Nomor 47 tahun 2016 tentang program penyuluh pertanian sebagai berikut:

1. Pembinaan kelembagaan petani.
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Penyusunan Programa

Kinerja penyuluh pertanian di kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya kelompok tani di kecamatan bathin solapan.
2. Membantu kelompok tani yang tidak bisa diselesaikan oleh kelompok tani, misalnya dalam pemberian pupuk yang baik untuk tanaman, jangka hasil panen yang baik untuk tanaman, dan memberi tahu cara memupuk tanaman yang baik dan efisiensi kepada kelompok tani agar buah yang dihasilkan lebih banyak dan bagus.
3. Membantu kelompok tani dalam pembuatan proposal untuk mendapatkan bantuan pupuk subsidi dari pemerintah kabupaten bengkalis.

Sumber: penyuluh pertanian bathin solapan, Ahmad Nazir S.P

Dari uraian diatas, permasalahan kelompok tani di kecamatan bathin solapan hampir sama yang dialami oleh penyuluh pertanian di kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis. Diseluruh desa di kecamatan bathin solapan kabupaten

bengkalis mempunyai permasalahan yang sama di sektor pertanian, karena kelompok tani yang ada di desa bathin solapan hanya memiliki kelompok tani perkebunan dan kelompok tani hultikultura. Jadi, untuk permasalahan di setiap desa di kecamatan bathin solapan sama yang di alami oleh setiap penyuluh pertanian yang ada dikecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis.

Tugas pokok penyuluh pertanian yakni penyuluh. Berikutnya, dalam melaksanakan penyuluhan bisa dipecah jadi, mempersiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi serta memberi tahu penerapan aktivitas penyuluhan. Tiap tenaga PPL di harapkan bisa menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan aktivitas buat pertumbuhan pertanian. Keberhasilan penyuluh pertanian bukan cuma bergantung pada teknis penyuluh pertanian saja, namun yakni gabungan dari seluruh aspek mulai dari penerapan tugas pokok serta guna penyuluh pertanian itu tersebut, kelembagaan, tata cara penyuluhan yang di terapkan, juga kondisi kelompok tani pula. (Samual et al. 2011)

Berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluh pertanian menyatakan bahwa Penyuluh pertanian mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun program penyuluhan tingkat desa/kelurahan dan membantu menyusun program penyuluhan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama.
2. Menyusun rencana kerja penyuluhan (RKP) berdasarkan program penyuluhan.
3. Menyusun peta wilayah komoditi unggulan dan spesifik lokasi

4. Mengupayakan kemitraan usaha antara pelaku utama dan pengusaha yang saling menguntungkan.
5. Menyebarkan informasi teknologi pertanian secara merata sesuai kebutuhan pelaku utama.
6. Mengisi buku kerja penyuluhan sebagai salah satu alat kendali kerja penyuluh.
7. Menginventarisasi data wilayah binaan, sebagai bahan dasar penetapan materi penyuluhan dan pengembangan ketahanan pangan.
8. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama dalam upaya penerapan teknologi pertanian.
9. Memberikan pelayanan/penyuluhan dan pembinaan terhadap pelaku utama dan kelembagaannya.
10. Menumbuhkan dan membina kelompok pelaku utama (POKTAN) dan gabungan kelompok pelaku utama (GAPOKTAN).
11. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dalam meningkatkan usahanya.
12. Membantu dan mengajar dalam kegiatan kursus tani.
13. Melaksanakan dan atau membantu pengujian/demplot/survey.
14. Menghadiri pertemuan rutin bulanan penyuluh di balai penyuluh dan unit-unit satker terkait di wilayah kerjanya.
15. Penyuluh pertanian disamping bertugas di wilayah binaannya juga bertugas membantu coordinator penyuluh kecamatan dalam membina pelaku utama sesuai sektor mereka di wilayah pelayanan kecamatan.

16. Menyampaikan laporan secara rutin maupun insidental untuk kegiatan penyuluhan dan pengembangan pertanian dilapangan.

Kinerja penyuluh pertanian sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Pada Biasanya, kinerja penyuluh pertanian sangat dipengaruhi pergantian orang penyuluh, psikologis serta organisasi ialah penyuluh melaksanakan tugas- tugas penyuluhan. Pergantian orang bisa diklasifikasikan dalam pergantian keahlian serta keahlian, latar balik individu serta demografis. Berikutnya perubahan psikologis bisa diformulasikan dalam pergantian anggapan, perilaku, karakter, belajar serta motivasi, sebaliknya peubah organisasi bisa dipecah dalam perubahan sumber energi, kepemimpinan, imbalan, struktur serta desain pekerjaan. (Sapar 2012)

Aktivitas penyuluhan pertanian merupakan sesuatu proses berkesinambungan buat mengantarkan data dan teknologi yang bermanfaat untuk petani serta keluarganya. Aktivitas ini diupa yakan supaya tidak memunculkan“ ketergantungan” petani kepada penyuluh, namun buat mencipta- kan kemandirian petani dengan memposisikan- nya selaku wiraswasta agribisnis (Mardikanto, 1993).

Jumlah tenaga penyuluh pertanian di Indonesia masih belum ideal dan belum sesuai dengan amanat UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Tercatat dari 72.000 desa yang berpotensi di bidang pertanian, baru tersedia 44.000 tenaga penyuluh pertanian. Seharusnya setiap desa itu satu penyuluh pertanian. Jumlah tenaga penyuluh yang berstatus pegawai negeri sipil saat ini mencapai 25.000 orang, sedangkan yang bersatus Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) berjumlah 19.000 orang.

Dari 44.000 tenaga penyuluh itu, 32.000 diantaranya yang bersentuhan langsung dengan petani di lapangan. Penyuluh yang ada di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, yang bersentuhan itu di tingkat desa. Mereka yang menangani 72.000 desa potensi pertanian di Indonesia. Secara rerata, seorang penyuluh harus menangani petani di tiga desa sehingga membuat pendampingan tidak berlangsung efektif dan optimal (Momon Rusmono dikutip Syaifudin, 2017).

Tabel 1.1 Jumlah Desa dan Jumlah Kelompok Tani Di Kecamatan Bathin Solapan

No	Nama Desa	Jumlah Kelompok Tani
1	Desa Tambusai Batang Dui	1 kelompok tani
2	Desa Simpang Padang	2 kelompok tani
3	Desa Pematang Obo	7 kelompok tani
4	Desa Balai Makam	11 kelompok tani
5	Desa Petani	16 kelompok tani
6	Desa Buluh Manis	18 kelompok tani
7	Desa Air Kulim	20 kelompok tani
8	Desa Bumbung	20 kelompok tani
9	Desa Bathin Sobanga	14 kelompok tani
10	Desa Pamesi	12 kelompok tani
11	Desa Sebangar	11 kelompok tani
12	Desa Boncah Mahang	25 kelompok tani
13	Desa Kesumbo Ampai	15 kelompok tani
Total		172 kelompok tani

Sumber: Olahan Penulis 2020

Berdasarkan tabel diatas bahwa Kecamatan Bathin Solapan berada Di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dalam hal ini Kabupaten Bengkalis memiliki beberapa Kecamatan, namun yang mempunyai potensi akan hasil pertanian adalah kecamatan Bathin Solapan. Kecamatan bathin solapan memiliki 13 desa yang mana hanya terdapat 4 penyuluh pertanian. ini menyebabkan seorang penyuluh pertanian di kecamatan bathin solapan ada yang membina 3 desa dan 4 desa, ini membuat kegiatan penyuluh pertanian berjalan tidak maksimal. Sementara di dalam

peraturan perundang – undangan tentang penyuluh pertanian Nomor 16 tahun 2006 menyebutkan bahwa penyuluh pertanian hanya mengelola satu desa agar kinerja penyuluh pertanian tersebut dapat berjalan secara maksimal dalam memberdayakan para kelompok petani yang berada di wilayah tersebut.

Tabel 1.2 Jumlah Kelompok Tani Tahun 2020

No	Nama Desa	Jumlah kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang terbina
1	Desa Petani	16 (enam belas)	9 (sembilan)
2	Desa Buluh Manis	18 (delapan belas)	5 (lima)
3	Desa Air Kulim	20 (dua puluh)	7 (tujuh)

Sumber: Penyuluh Pertanian Bathin Solapan, Ahmad Nazir S.P

Berdasarkan dari tabel diatas menekankan bahwa ketiga Desa tersebut memiliki sektor pertanian yang lebih unggul seperti dalam hal pertanian hijau yang lebih besar dari desa – desa yang lain yang berada dikecamatan bathin solapan. Sebab, desa yang lain hanya dominan pada hasil pertanian seperti karet dan sawit. Sektor pertanian yang menjadi primadona dari ketiga desa tersebut yaitu papaya, timun, melon dan lainyaa. Namun ketiga desa tersebut masih memiliki permasalahan didalam penyuluh pertanian yaitu:

1. Masih Kurangnya pembinaan kepada kelompok tani
2. Masih Kurangnya tenaga penyuluh pertanian
3. Masih lambannya pendistribusian pupuk subsidi pemerintah kepada kelompok tani

Ini membuat kinerja penyuluh pertanian menjadi tidak optimal di dalam melakukan penyuluhan kepada kelompok petani. Sehingga tidak semua kelompok petani yang ada di beberapa desa tersebut tidak mendapatkan penyuluhan dari penyuluh pertanian secara maksimal.

Tabel 1.3 Jumlah Kunjungan Penyuluh Pertanian Tahun 2020

No	Nama Kelompok Tani	Waktu	Tempat
1	Sejati Mulya 2	2 November 2020	Desa Buluh Manis
2	Harapan Jaya	4 November 2020	Desa Petani
3	Pagura Bersama	5 November 2020	Desa Petani
4	Sepakat	10 November 2020	Desa Buluh Manis
5	Karya Tani	11 November 2020	Desa Petani
6	Helipat Membangun	12 November 2020	Desa Petani
7	Mawar B	17 November 2020	Desa Air Kulim
8	Anugrah Alam	18 November 2020	Desa Air Kulim
9	Cempaka	19 November 2020	Desa Petani
10	Taruna Bakti	24 November 2020	Desa Buluh Manis
11	Kurnia Abadi	25 November 2020	Desa Petani
12	Rindang Jaya	26 November 2020	Desa Petani

Sumber: Penyuluh Pertanian Bathin Solapan, Ahmad Nazir S.P

Berdasarkan tabel diatas mengenai jumlah kunjungan penyuluh pertanian maka dapat digeneralisasikan bahwa jumlah kunjungan penyuluh pertanian selama 1 bulan hanya 12 kali. Hal ini menyebabkan banyaknya kelompok tani yang tidak terbina dengan baik oleh penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian lebih berfokus kepada desa petani daripada Desa Buluh Manis dan Desa Air Kulim. hal ini menyebabkan tidak merata sosialisasi kepada kelompok tani.

Berdasarkan fenomena dan uraian yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, serta fenomena atau gejala yang telah diuraikan maka rumusan masalah penelitian yang penulis teliti adalah “Bagaimana Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui Hambatan Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Aspek akademis, sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya agar dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepastakaan sehingga dapat menambah bahan kajian perbandingan bagi yang tertarik dalam bidang ini.
- b. Aspek teoritis, sebagai bahan manfaat penelitian agar dapat mengembangkan teori-teori yang telah ada sehingga memperkaya hasil-hasil ilmu pengetahuan baru.
- c. Aspek empiris, sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam kinerja penyuluh pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan berfikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

1. Konsep ilmu pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas. Penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik. Beberapa pendapat para ahli mengenai ilmu pemerintahan yang akan penulis jabarkan sebagai berikut:

Menurut Inu Kencana Syafiee Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah Intinya:

Melaksanakan koordinasi, kepemimpinan, legislatif, eksekutif, yudikatif , hubungan pusat, yang di perintah. (DR.H. Inu Kencana Syafiie, 2001)

Menurut C.F. Strong (Inu Kencana Syafiie ,2001:22) Ilmu Pemerintahan merupakan organisasi dalam mana diletakkan hak buat melakukan kekuasaan berdaulat ataupun paling tinggi. Berikutnya Strong melaporkan pemerintahan itu memiliki kekuasaan. Intinya terletak pada organisasi serta kekuasaan.

Menurut U.rosenthal dalam (Inu Kencana Syafiie, 2001:21) “de beesturswetenschap is de wetenschap die zich uitsluitend bezighoudt met de studie van interneen externe werking van de structuren en processen” ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Intinya : terletak pada struktur serta proses pemerintah.

Menurut D.G.A. Van Poelje dalam (Inu Kencana Syafiie, 2001:21) “de bestuurskunder leert, hoe men de openbare dienst het beste inricht en leidt”. ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Intinya : kepemimpinan dan sistem penjalanan pemerintahan.

Menurut W.S. Sayre dalam (Inu Kencana Syafiie, 2001:22) “gavermant is bast as the organized agency of the state, expressing and exersing is aynthority” maksudny pemerintahan dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaanya.

Menurut Robert Mac Iver dalam (Inu Kencana Syafiie, 2001:22) “government is the organization of men under authority how men can be governed”

maksudnya pemerintahan itu adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah (a science of how men are governed). Intinya : cara untuk memerintah individu atau kelompok organisasi.

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam (Syafiie 2013:11) Ilmu pemerintah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kebutuhan setiap orang akan layanan publik dan PNS dalam hubungan pemerintahan ketika personel terkait membutuhkannya (agar dapat diterima). Dapat diartikan pemerintah harus mampu melakukan memenuhi semua kebutuhan baik jasa publik serta layanan yang lain yang bersifat umum .

Menurut Musanef dalam (Syafiie 2013:11) ilmu pemerintahan merupakan suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, sehubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili dinas, ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam artian yang seluas-luasnya baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa.

Menurut Ermaya Suradinata (2007) Ilmu pemerintahan adalah studi tentang lembaga publik dengan fungsi dan tujuan nasional. Yang paling penting: lembaga pemerintah organisasi internal dan eksternal. Pemerintah juga merupakan kegiatan dimana lembaga publik menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan nasional, dan yang menyelenggarakan pemerintahan disebut pemerintah

2. Konsep Pemerintahan

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata perintah yang kemudian mendapat awalan pe- menjadi kata pemerintah, sehingga pemerintah berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus negara; serta mendapat akhiran -an menjadi kata pemerintahan, berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memilih legitimasi. Selanjutnya Syafiie menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah (Rusadi, Wedayanti, dan Branding 2019).

Menurut Ndraha (2015:5) Pemerintahan adalah sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang-diperintah akan jasa-publik dan layanan civil. Lebih lanjut Iver dalam Syafiie (2013:45) mengartikan pemerintahan itu sebagai organisasi dari orang-orang yang berkuasa (*government is the organization of men under authority*).

Menurut Maulidiah dalam (Rauf 2017) bahwa, Pemerintahan secara umum merupakan organisasi atau lembaga yang dianugerahi legitimasi (keabsahan) oleh rakyat yaitu penguasa tertinggi yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) di suatu negara, dan dilengkapi dengan alat-alat perangkat pelengkap negara. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa komponen utama pemerintah berupa organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga tersebut diberikan legitimasi berupa kewenangan oleh masyarakat melalui proses pemilihan umum dan memiliki kekuasaan untuk bertindak sebagai organisasi atau lembaga

nasional. Unsur pendukung misi adalah tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan pemerintah tidak lebih sekedar menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1. Konsep Pemerintahan Daerah

Undang - Undangan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 mengatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani "*autonomic*" yaitu *auto* artinya sendiri dan *nomos* artinya undang - undang. Secara harfiah otonomi diartikan sebagai pemberian suatu hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pada pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah itu berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya yaitu urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonom yang seluas - luasnya.

Pemberian Otonomi yang seluas - luasnya kepada daerah dijalankan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan

pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan pemerintah daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Daerah hanya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sendiri sepanjang itu tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum yang ada. Jika dilihat dari Undang - Undang tersebut maka tujuan otonomi daerah adalah:

1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik.
2. Memberi kesempatan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.
3. Meringankan beban pemerintahan pusat.
4. Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah.
5. Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah untuk menjaga keutuhan NKRI.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
7. Mewujudkan kemandirian dalam pembangunan.

Ciri - ciri daerah otonom:

1. Segala urusan yang diselenggarakan menjadi urusan sendiri.
2. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh perangkat daerah.
3. Penanganan segala urusan dilaksanakan atas dasar inisiatif sendiri atau kebijakan sendiri.

4. Hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah adalah hubungan pengawasan saja.
5. Desentralisasi yaitu pemberian kekuasaan pemerintahan, dari pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan.

Menurut kaho (1997) desentralisasi yaitu membantu sebagian kewajiban pemerintah pusat, kewenangan pemerintah pusat menyangkut beberapa persoalan ataupun masalah yang dibutuhkan tindakan yang lebih cepat serta daerah tidak perlu menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait desentralisasi teritorial.

Menurut (Syamsyudin, 2007) desentralisasi merupakan perolehan kewenangan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom yang bertujuan menjalankan pemerintahan daerahnya dengan sendiri. Desentralisasi meliputi struktur organisasi yang artikan sebagai pemberian kekuasaan. Pembentukan desentralisasi dapat mempengaruhi perkembangan suatu negara, karena dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dari berbagai macam pengertian dari pemerintahan daerah maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah merupakan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Konsep Evaluasi

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah “evaluasi” biasanya diartikan setara dengan istilah “penilaian”, yaitu suatu tindakan yang menentukan objek, keadaan, peristiwa, atau aktivitas tertentu yang diamati. Pengertian seperti itu, juga dikemukakan oleh Soumelis dalam Mardikanto dan Soebiato (2013: 265) yang mengartikan evaluasi sebagai proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membanding-bandingkan hasil pengamatan terhadap sesuatu objek.

Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan, memperoleh dan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Menurut Sudjana (2006:7) evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menentukan apakah tujuan yang diharapkan dapat tercapai, apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan apa dampaknya setelah pelaksanaan program.

Sebagaimana dikemukakan oleh Nurcholis (2005:169), evaluasi menurutnya merupakan suatu proses yang didasarkan pada disiplin waktu yang ketat. Melalui evaluasi, dimungkinkan untuk melihat kendala atau keterbatasan yang muncul sebagai akibat dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengatur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaannya.

Menurut Yusuf (2003:3) Evaluasi merupakan upaya mengukur secara objektif dan memperoleh nilai dari pencapaian hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk perencanaan masa depan. Istilah *rating* dapat disamakan dengan penafsiran (*Appraisal*), pemberian angka (*Rating*), dan penilaian (*Assessment*).

Sehubungan dengan itu, Frutchey (1973) mengemukakan bahwa kegiatan evaluasi selalu mencakup kegiatan:

1. Observasi
2. Membanding-bandingkan antara hasil pengamatan dengan pedoman yang ada atau telah ditetapkan terlebih dahulu
3. Pengambilan keputusan atau penilaian atas objek yang diamati.

Sedangkan menurut Charlesa O. Jones dalam (Yuda 2009) adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi menentukan apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan tujuan utama, kemudian kegiatan evaluasi dapat memberikan tolak ukur untuk menentukan apakah kegiatan, kebijakan atau kegiatan tersebut dapat dianggap layak, perlu diperbaiki atau dihentikan.

Menurut Dunn, dalam (Kusuma 2017) memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”.

Menurut Dunn dalam (Samuel dan Mandas 2018), mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur

keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:

- a) Efektivitas, penekanan kriteria ini terletak pada ketercapaian hasil. Apakah hasil yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan sudah tercapai.
- b) Efisiensi, fokus dari kriteria adalah personal sumber daya, yakni seberapa sumber daya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.
- c) Kecukupan, kriteria ini mempersonalkan memadainya hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan, atau seberapa jauh dalam pencapaian hasil dapat memecahkan masalah kebijakan.
- d) Pemerataan, kriteria ini menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat.
- e) Responsivitas, kriteria ini membahas aspek kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran atas hasil kebijakan. Apakah hasil kegiatan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan mereka atau tidak.
- f) Ketepatan, kriteria ini menganalisis tentang kegunaan hasil kebijakan, yakni apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat, khususnya kelompok sasaran.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan itu, terdapat beberapa pokok pikiran yang terkandung dalam pengertian “evaluasi” sebagai kegiatan terencana dan sistematis yang meliputi:

1. Pengamatan untuk pengumpulan data atau fakta
2. Penggunaan “pedoman” yang telah ditetapkan

3. Pengukuran atau membandingkan hasil pengamatan dengan pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan terlebih dahulu
4. Penilaian dan pengambilan keputusan

a. Teori Efektivitas

Efektivitas umumnya dipahami sebagai ukuran pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Bagi Siagian (2001:24), efektivitas adalah sumber energy, peralatan dan infrastruktur yang digunakan dalam jumlah yang telah ditentukan untuk menciptakan fasilitas bagi layanan bisnis. Efektivitas adalah keberhasilan yang diharapkan dari hasil yang di peroleh dari pekerjaan yang dicoba (Kristiani, 2012). Ompusunggu (2002) membagi pengertian efektivitas sebagai sukses ditinjau dari kualitas, kuantitas dan waktu yang digunakan serta hasil dari pekerjaan yang telah dicapai.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, ialah *effective* yang berarti sukses, ataupun suatu yang dicoba sukses dengan baik. Paramitha (2015) mengungkapkan bahwa “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Menurut Saksono dalam Paramitha (2015). Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

Mardiasmo (2009:132) Efektivitas secara umum berkaitan dengan pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan (hasil penggunaan). Efektivitas adalah hubungan antara hasil dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Kegiatan

operasional dikatakan efektif jika proses operasi mencapai tujuan dan sasaran kebijakan akhir (*spending wisely*).

b. Teori Efisiensi

Menurut Susantun (2000) efisiensi adalah rasio antara produksi dan input yang berkaitan dengan pencapaian efisiensi maksimum dengan beberapa input, artinya jika rasio output-input besar, maka efisiensi dikatakan lebih tinggi.

Menurut Soekartawi (2002) efisiensi diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan menggunakan input sekecil mungkin untuk memperoleh produksi yang semaksimal mungkin. Penetapan input ini dapat ditemukan dengan melihat nilai tambah dari satu-satunya biaya input yang digunakan dalam unit pembinaan yang dihasilkan. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai tidak menyia-nyikan barang atau memanfaatkan sumber daya ekonomi secara efisien untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Menurut Coelli et al. (1998), Efisiensi harga atau alokasi mengukur tingkat keberhasilan petani dalam upaya mencapai keuntungan maksimum, yang dicapai jika nilai produk marginal dari setiap faktor produksi sama dengan biaya marginalnya atau menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan input dalam proporsi yang optimal pada setiap harga input dan teknologi.

Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan (output) dengan biaya masukan minimum. Kegiatan dapat terlaksana dengan baik apabila pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan (output) dengan sedikit pengorbanan (input), sehingga efisiensi dapat diartikan tidak ada pemborosan. (Nicholson, 2002).

Menurut Martosubroto, suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika memenuhi beberapa hal berikut (Utaminingsih, 2007):

1. Memakai jumlah unit input yang lebih sedikit daripada jumlah unit input yang digunakan oleh perusahaan lain tapi tetap menghasilkan jumlah output yang sama.
2. Memakai jumlah unit input yang sama dengan perusahaan lain tetapi dapat menghasilkan jumlah output yang lebih besar.

Tingkat efisiensi dari pemakaian faktor produksi merupakan salah satu indikator dari kinerja suatu industri. Semakin sedikit pemakaian input untuk menghasilkan output dalam jumlah tertentu, maka semakin tinggi tingkat efisiensi dari pemakaian input tersebut.

c. Teori Responsivitas

Menurut Agus Dwiyanto (2008: 62), Responsivitas merupakan kemampuan birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat menyusun rencana dan proiritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Singkatnya, responsivitas ini dapat dikatakan mengukur kemampuan birokrasi dalam memenuhi harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan pengguna jasa.

Menurut Hassel Nogi S. Tangkilisan (2005) Responsivitas berkaitan dengan penyelarasan program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Responsivitas termasuk dalam salah satu indikator kinerja, karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam memenuhi misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidaksesuaian antara layanan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Hardiyansyah, (2011: 47) Menyebutkan responsivitas adalah keinginan untuk membantu konsumen bertanggung jawab atas kualitas layanan yang diberikan.

Santoso (2008: 131) menyatakan bahwa responsivitas adalah kemampuan lembaga public dalam merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dan hak dasar manusia (hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya)

d. Teori Ketepatan

Tepat berarti sesuai dengan harapan atau keinginan yang dikehendaki. Ketepatan merupakan kemampuan mengarahkan sesuatu dengan sadar kepada obyek yang dikehendaki. Menurut Poerwadarminto (1979: 1055) ketepatan dapat diartikan sebagai ketelitian atau kejutan. Dalam konteks olahraga Suharno (1982: 35) mengemukakan bahwa ketepatan adalah kemampuan untuk mengarahkan sesuatu gerak ke sesuatu sasaran sesuai dengan tujuannya.

Ketepatan merupakan kemampuan mengarahkan sesuatu dengan sadar kepada objek yang dikehendaki. Menurut Poerwadarminto (1979: 1055) tepat adalah betul atau lurus arahnya dan jurusannya. Dalam konteks olahraga Suharno H. P. (1980/1981: 32) mengemukakan kalau ketepatan merupakan keahlian seorang buat memusatkan suatu gerak ke suatu target cocok dengan tujuannya.

Menurut Sajoto (1988:59) ketepatan merupakan keahlian dalam mengatur gerak- gerak leluasa terhadap sesuatu target. Ketepatan ialah aspek yang dibutuhkan seorang buat menggapai sasaran yang di idamkan. Ketepatan berhubungan dengan kemauan buat membagikan arah kepada target dengan iktikad serta tujuan tertentu.

e. Teori Kecukupan

Menurut Winarno (2002:186) kecukupan dalam kebijakan public dapat dikatakan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan atau adquacy berhubungan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah kecukupan masih berkaitan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksikan seberapa jauh alternative yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Perihal ini berarti kalau saat sebelum sesuatu produk kebijakan di sahkan serta dilaksanakan wajib terdapat analisis kesesuaian tata cara yang hendak dilaksanakan dengan target yang hendak dicapai, apakah triknya telah benar ataupun menyalahi ketentuan ataupun teknis penerapan yang benar.

f. Teori perataan

Menurut Winarno (2002:187) perataan dalam kebijakan public bisa dikatakan memiliki makna dengan keadilan yang diberikan serta diperoleh target kebijakan public. Kriteria kesamaan ataupun equity erat berhubungan dengan rasionalitas sah

serta sosial serta menampilkan pada distribusi akibat serta usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam warga. Kebijakan yang berorientasi pada perataan merupakan kebijakan yang dampaknya ataupun usaha secara adil didistribusikan. Sesuatu program tertentu bisa jadi bisa efisien, efektif, serta memadai apabila bayaran khasiat menyeluruh.

Menurut Winarno (2002:188) seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisa dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar perangkat prevensi transitif tunggal di kontruksikan berdasarkan nilai semua individu.
2. Melindungi kesejahteraan minimum. Disini analis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagai orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang yang dirugikan (Worst Off). Pendekatan ini didasarkan pada kriteria, pareto yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan atau di rugikan.
3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Disini analis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini berdasarkan pada kriteria Kaldor-Hicks: suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lain jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka memperoleh dapat menggantikan mereka

yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak masyarakat bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.

4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributive. Disini analis berusaha memaksimalkan manfaat redistributive untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributive dirumuskan oleh Filosof John Rawls: suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang diinginkan.

4. Konsep Kinerja

Secara *etimologi* kinerja berasal dari kata *performance*. Kata tersebut digunakan untuk menyebutkan hasil pekerjaan yang telah dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang, seperti prestasi belajar berarti hasil yang dicapai oleh seseorang setelah melakukan aktivitas belajar atau prestasi dalam bidang lainnya. Istilah kinerja mulai populer setelah digunakan dalam ilmu manajemen yang mana istilah kinerja didefinisikan dengan istilah hasil kerja, prestasi kerja dan *performance*. Menurut Samsudin (2005), kinerja merupakan tingkatan penerapan tugas yang bisa dicapai seorang, unit ataupun divisi dengan memakai keahlian yang terdapat serta batasan- batasan yang sudah diresmikan buat menggapai tujuan organisasi ataupun industri.

Kinerja merupakan hasil kerja yang bisa dicapai oleh seorang ataupun sekelompok orang dalam sesuatu organisasi cocok dengan wewenang serta tanggung jawab tiap- tiap ke arah pencapaian tujuan yang diresmikan (Hasibuan, 2001).

Kinerja merupakan pencapaian atas tujuan organisasi yang bisa tercipta output kuantitatif ataupun kualitatif, kreatifitas, fleksibilitas, bisa diandalkan ataupun hal- hal lain yang bisa di idamkan organisasi. Penekanan kinerja bisa bertabat jangka pendek ataupun jangka panjang, pula pada tingkatan orang, kelompok maupun organisasi. Kinerja orang membagikan donasi pada kinerja kelompok yang berikutnya membagikan donasi pada kinerja organisasi. Pada organisasi yang sangat efisien, pihak manajemen menolong menghasilkan sinergi yang positif, ialah secara totalitas yang lebih besar dari pada jumlah dari bagian-bagiannya. Ditingkat manapun tidak ada satu ukuran kriteria yang tepat merefleksikan kinerja (Gibson; 2003:18).

Kinerja merupakan perilaku manusia dalam suatu organisasi yang memenuhi standar perilaku yang ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kinerja merupakan hasil kerja baik secara mutu ataupun kuantitas yang dicapai oleh seorang dalam melakukan tugas cocok tanggung jawab yang diberikan. Kinerja dipengaruhi oleh sebagian aspek antara lain terdapatnya daya guna penyeimbang antara pekerjaan serta area yang terletak di dekatnya serta meliputi orang, sumber energi, kejelasan kerja serta umpan balik (Mangkunagara, 2000: 22).

5. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal yaitu:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Menurut Kartasmita dalam Totok dan Soebianto (2015:53) mendefinisikan kalau pemberdayaan merupakan upaya buat membangun energi itu sendiri, dengan mendesak, memotivasi serta membangkitkan pemahaman hendak kemampuan yang dimilikinya dan berupaya buat mengembangkannya. Berikutnya, upaya tersebut diiringi dengan menguatkan kemampuan ataupun energi yang dipunyai oleh warga itu sendiri. Sumodiningrat dalam Mardikanto serta Soebianto (2015:33) pula berkomentar kalau pemberdayaan ialah upaya pemberian peluang serta ataupun memfasilitasi kelompok miskin supaya mereka mempunyai aksesibilitas terhadap sumberdaya, yang berbentuk modal, teknologi, data, jaminan pemasaran serta lainlain supaya mereka sanggup memajukan serta meningkatkan usahanya, sehingga mendapatkan revisi pemasukan dan ekspansi peluang kerja demi revisi kehidupan serta kesejahteraan.

Dengan demikian, Pemberdayaan bagi Suharto (2005:59-60) merupakan suatu proses serta tujuan. Selaku Proses, pemberdayaan merupakan serangkaian aktivitas buat menguatkan kekuasaan ataupun keberdayaan kelompok lemah dalam warga, tercantum individu- individu yang hadapi permasalahan kemiskinan. Selaku

Tujuan, hingga pemberdayaan menunjuk pada kondisi ataupun hasil yang mau dicapai oleh suatu pergantian sosial ialah warga yang berdaya, mempunyai kekuasaan ataupun memiliki pengetahuan serta keahlian dalam penuhi kebutuhan hidupnya baik yang bertabiat raga, ekonomi ataupun sosial semacam mempunyai keyakinan diri, sanggup mengantarkan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam aktivitas sosial serta mandiri dalam melakukan tugas- tugas kehidupannya (Widiyanto, Hikmawan, & Riswanda, 2019).

6. Konsep Penyuluhan

Penyuluhan berasal dari kata “suluh” yang bisa dimaksud dapat menerangi. Penyuluhan merupakan sesuatu proses demokrasi, maksudnya sesuatu penyuluhan wajib sanggup meningkatkan atmosfer leluasa buat berfikir, berdiskusi, menuntaskan perkaranya, merancang serta berperan bersama sama. Penyuluhan merupakan proses kontinu, maksudnya penyuluhan wajib diawali dari kondisi petani pada dikala itu ke arah tujuan yang mereka kehendaki, bersumber pada kebutuhan serta kepentingan yang tetap tumbuh. (Isran, 2012:4)

Penyuluhan bisa jadi efisien bila dipadukan dengan riset, penyediaan input serta pinjaman dan pemasaran. Penyuluhan pula mengarahkan kepada petani buat menciptakan (tumbuhan ataupun ternak) lewat metode yang sangat menguntungkan, serta mengendalikan diri sendiri dalam koperasi serta organisasi petani yang lain. (Van den Ban dan Hawkins, 1992:5)

Menurut Kusnadi (2011), Penyuluhan merupakan upaya mengantarkan data (pesan) yang berkaitan dengan bidang oleh penyuluh kepada petani beserta anggota keluarganya baik secara langsung ataupun tidak langsung ataupun tidak langsung supaya mereka ketahui, ingin serta sanggup memakai inovasi teknologi baru.

Menurut Hawkins (2012), Penyuluhan diketahui secara luas serta diterima oleh mereka yang bekerja di dalam organisasi pemberi jasa penyuluhan, namun tidak demikian halnya pada warga luas. Penyuluhan ialah salah satu pembelajaran non resmi yang diberikan kepada petani. Penyuluhan yang diberikan kepada petani umumnya diucap dengan penyuluhan.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Diqa Aulia Sari	Kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas pokok penyuluh pertanian di BP3K kecamatan banjar baru kabupaten tulang bawang	Melakukan penelitian terhadap kelompok tani Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif	<p>Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017</p> <p>Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan pada tahun 2020</p> <p>Lokasi penelitian terdahulu berada di kabupaten tulang bawang</p> <p>Sementara penelitian yang dilakukan penulis berada di kabupaten bengkalis</p>
2	Dewi Darmawati	Kepuasan petani terhadap pelayanan penyuluh pertanian dalam aktivitas penyuluh pertanian di kabupaten banyuasin	Melakukan penelitian terhadap kelompok tani Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif	<p>Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2019</p> <p>Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan pada tahun 2020</p> <p>Lokasi penelitian terdahulu berada di kabupaten banyuasin</p> <p>Sementara penelitian yang dilakukan penulis</p>

1	2	3	4	5
				berada di kabupaten bengkalis
3	Eriantina	Analisis efektivitas program pemberdayaan penyuluh pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani padi sawah menurut perspektif ekonomi di kabupaten bandung barat	Melakukan penelitian terhadap kelompok tani Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif	<p>Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2018</p> <p>Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan pada tahun 2020</p> <p>Lokasi penelitian terdahulu berada di kabupaten bandung barat</p> <p>Sementara penelitian yang dilakukan penulis berada di kabupaten bengkalis</p>
4	Ibnu Abas	Analisis kinerja penyuluh pertanian di daerah terpencil (studi kasus dikecamatan krayan kabupaten nunukan)	Melakukan penelitian terhadap kelompok tani Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif	<p>Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2014</p> <p>Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan pada tahun 2020</p> <p>Lokasi penelitian terdahulu berada di kabupaten nunukan</p> <p>Sementara penelitian yang dilakukan penulis</p>

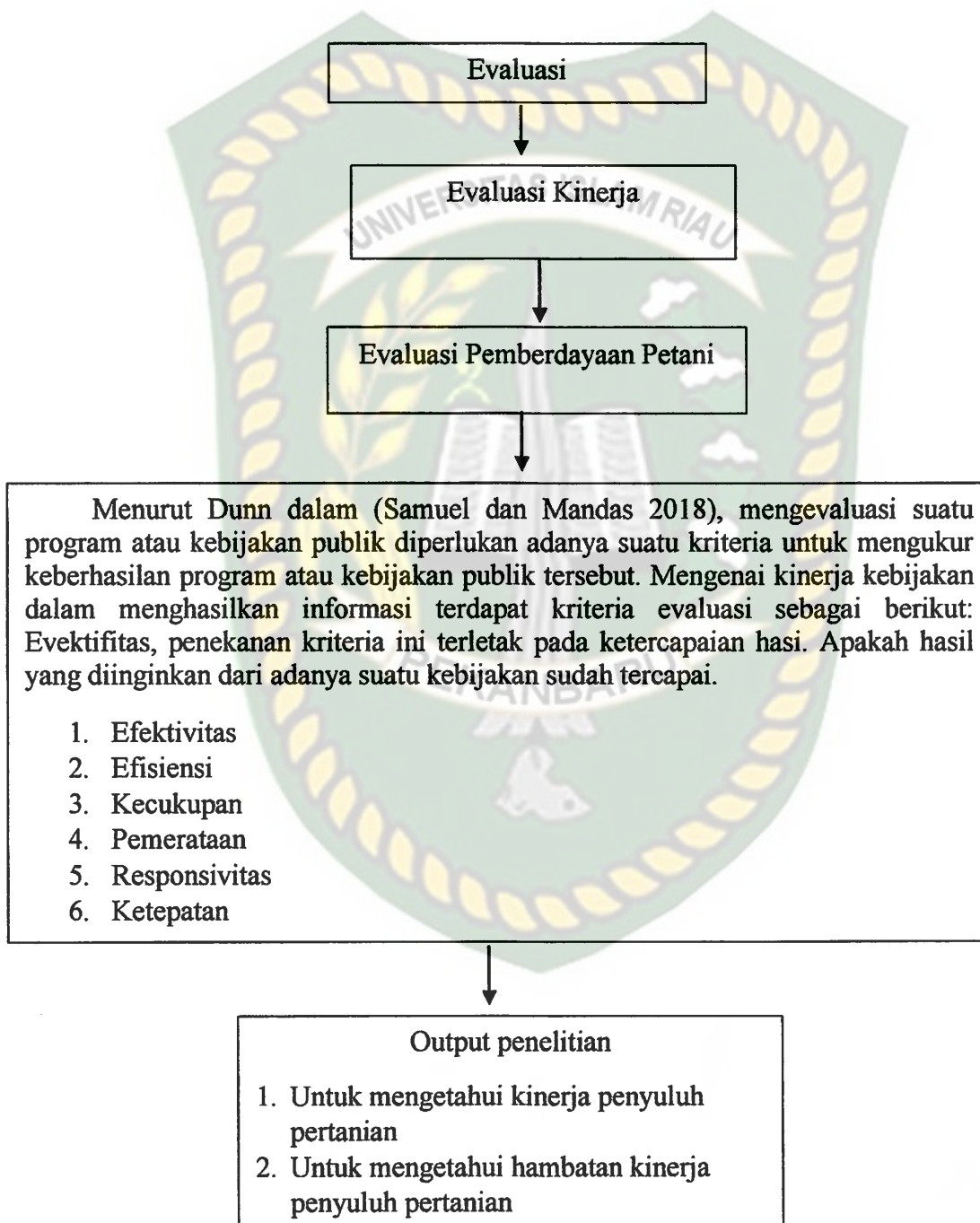
1	2	3	4	5
				berada di kabupaten bengkalis
5	Marco Marsel Sambeka	Kinerja Penyuluh Pertanian Terhadap Kelompok Tani Mega Mandiri Di Desa Kolongan Kecamatan Kalawat kabupaten minahasa utara	Melakukan penelitian terhadap kelompok tani Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif	<p>Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2015</p> <p>Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan pada tahun 2020</p> <p>Lokasi penelitian terdahulu berada di kabupaten minahasa utara</p> <p>Sementara penelitian yang dilakukan penulis berada di kabupaten bengkalis</p>

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

C. Kerangka Pikir

Gambar II. 1 Kerangka pikir penelitian tentang Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.



D. Konsep operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.
- b) Evaluasi adalah memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.
 1. Efektivitas, penekanan kriteria ini terletak pada ketercapaian hasil. Apakah hasil yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan sudah tercapai.
 2. Efisiensi, fokus dari kriteria adalah personal sumber daya, yakni seberapa sumber daya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.
 3. Kecukupan, kriteria ini mempersonalkan memadainya hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan, atau seberapa jauh dalam pencapaian hasil dapat memecahkan masalah kebijakan.

4. Pemerataan, kriteria ini menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat.
 5. Responsivitas, kriteria ini membahas aspek kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran atas hasil kebijakan. Apakah hasil kegiatan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan mereka atau tidak.
 6. Ketepatan, kriteria ini menganalisis tentang kegunaan hasil kebijakan, yakni apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat, khususnya kelompok sasaran.
- c) Kinerja merupakan hasil kerja yang bisa dicapai oleh seorang ataupun sekelompok orang dalam sesuatu organisasi cocok dengan wewenang serta tanggung jawab tiap- tiap ke arah pencapaian tujuan yang diresmikan.
- d) Pemberdayaan merupakan upaya buat membangun energi itu sendiri, dengan mendesak, memotivasi serta membangkitkan pemahaman hendak kemampuan yang dimilikinya dan berupaya buat mengembangkannya. Berikutnya, upaya tersebut diiringi dengan menguatkan kemampuan ataupun energi yang dipunyai oleh warga itu sendiri.
- e) Penyuluhan ialah sesuatu usaha memberitahukan hal- hal yang baru supaya warga ingin tertarik serta berminat buat melaksanakannya dalam kehidupan mereka satu hari hari. Penyuluhan pula ialah sesuatu aktivitas mendidik, membagikan pengetahuan, informasi- informasi, serta keahlian keahlian baru, supaya mereka bisa membentuk perilaku serta berprilaku hidup bagi apa yang sepatutnya.

E. Operasional Variable

Konsep	Variable	Indicator	Item yang dinilai
1	2	3	4
<p>Pengertian evaluasi menurut Menurut Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (<i>appraisal</i>), pemberian angka (<i>rating</i>) dan penilaian (<i>assessment</i>), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”</p>	<p>Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian</p>	Efektivitas	<p>a. Tercapainya kinerja penyuluh pertanian b. terlaksananya kinerja penyuluh pertanian</p>
		efisiensi	<p>a. ketersediaan dana dalam sektor pertanian b. pengeluaran dana dalam sektor pertanian</p>
		kecukupan	<p>a. kecukupan dalam sarana dan prasarana b. kecukupan dalam pelaksanaan program</p>
		Pemerataan	<p>a. pemberian pelayanan oleh penyuluh pertanian b. pelaksanaan pelayanan oleh penyuluh pertanian</p>
		Responsivitas	<p>a. penilaian terhadap kinerja penyuluh pertanian kepada kelompok tani b. program pertanian yang dilaksanakan penyuluh pertanian</p>
		ketepatan	<p>a. keberhasilan tujuan dalam pemberdayaan kepada kelompok tani b. pemanfaatan dalam pemberdayaan kepada kelompok tani</p>



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah metode Kualitatif.

Menurut Creswell (2016:4-5) Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menjadi tentang Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di 3 Desa, yaitu Desa Petani, Desa Buluh Manis, dan Desa Air Kulim di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

C. Informan

Peneliti menggunakan *purposive sampling* karena informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan mengenai Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Berikut ini adalah informan dalam penelitian ini:

Tabel III.1: Informan Dan Key Informan Dalam Penelitian Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Jabatan	Jumlah	Informan
1	Kepala UPT Balai Penyuluh pertanian	1	Key Informan
2	Penyuluh Pertanian	1	Informan
3	Kepala Desa	3	Informan
4	Kelompok Tani	6	Informan
Total		11	

Sumber: Olahan Penulis 2020

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literature-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan sosial budaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

2. Teknik *Interview* (Wawancara)

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka

pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

3. Teknik Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain-lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data menurut Creswell. Menurut Creswell (2016:260) analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ada lima tahapan analisa data yaitu:

a. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda bergantung pada sumber informasi.

b. Membaca keseluruhan data

Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

c. Memulai *coding* semua data

Coding merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan (bagian teks atau bagian gambar) dan menuliskan kategori dalam batas-batas.

- d. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* (ranah), orang (partisipan), kategori, dan tema yang akan dianalisis.

Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam *setting* (ranah).

- e. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif.

Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema tertentu (lengkap dengan beberapa subtema, ilustrasi khusus, perspektif, dan kutipan), atau tentang keterhubungan antar tema.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Juli- Oktober				Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuisisioner																								
5	Rekomendasi Survei																								
6	Survei Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Komferehensi Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis termasuk di dalam salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis dikenal akan kekayaan sumber daya alam yang besar, baik berupa migas maupun non migas. Sektor migas berupa minyak bumi, dan non migas berupa hasil komoditi perkebunan, pertanian, peternakan, dan pariwisata.

Kabupaten bengkalis terletak di daerah yang sangat strategis, di samping berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Kabupaten Bengkalis juga berada pada kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura. (IMS-GT).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia merdeka berada di wilayah pemerintahan kerajaan Siak Sri Indrapura. Namun, setelah Indonesia merdeka, dan penyerahan oleh raja kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II, seluruh wilayah Siak termasuk Bengkalis berada di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 1956 yakni berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuklah Kabupaten daerah tingkat II Kabupaten Bengkalis, yang pada waktu itu masih berada dibawah Provinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Sumatera Utara. Setelah di bentuk daerah tingkat I Riau berdasarkan undang-undang nomor 61 tahun 1958 tentang penetapan pembentukan

Kabupaten daerah tingkat I Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, maka Kabupaten daerah tingkat II Bengkalis berada dalam provinsi daerah tingkat I Riau.

Setelah pemekaran, penduduk Kabupaten Bengkalis menjadi 545.737 jiwa yang sebelum pemekaran adalah 1.182.267 jiwa, adapun luas wilayahnya 7.773,93 km². Diposisi utara 2030'LU-0017LU dan 100052'BT-102010'BT, dengan batas-batas:

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan selat malaka
- b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Siak
- c. Sebelah barat : berbatasan dengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Rokan Hulu
- d. Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Meranti

Bengkalis beriklim tropis, yang sangat terpengaruh sifat iklim laut, musim hujan terjadi antara bulan September hingga Januari, dengan curah hujan berkisar antara 809-4.078 mm/tahun. Musim kemarau terjadi di bulan Februari hingga Agustus. Kabupaten Bengkalis terbagi dari beberapa Kecamatan, antara lain:

- a. Kecamatan Bengkalis dengan luas wilayah 514,00 km²
- b. Kecamatan Bantan dengan luas wilayah 424,40 km²
- c. Kecamatan Bukit Batu dengan luas wilayah 1.128,00 km²
- d. Kecamatan Mandau dengan luas wilayah 184 km²
- e. Kecamatan Rupert dengan luas wilayah 896,35 km²
- f. Kecamatan Rupert Utara dengan luas wilayah 628,50 km²
- g. Kecamatan Pinggir dengan luas wilayah 2.503,00 km²

- h. Kecamatan Siak Kecil dengan luas wilayah 742,21 km²
- i. Kecamatan Bathin Solapan dengan luas wilayah 753,47 km²
- j. Kecamatan Bandar Laksamana
- k. Kecamatan Tualang Mandau

B. Gambaran umum Kecamatan Bathin Solapan

Secara geografis kecamatan Bathin Solapan yang ibu kotanya Desa Sebarang merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis yang berada di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sebanyak 89.187 Jiwa. Kecamatan Bathin Solapan pada awalnya terbentuk pada bulan maret di tahun 2017 karena pemekaran kecamatan yang terpisah dari kecamatan Mandau. Pada saat ini kantor camat bathin solapan masih ngontrak, karena kantor kecamatan bathin solapan masih dalam pengerjaan infastruktur. Jadi, pelayanan di kantor kecamatan bathin solapan belum sepenuhnya bisa dilakukan oleh kecamatan bathin solapan, jadi pengurusan dan pelayanan kependudukan masih menumpang di kantor kecamatan Mandau untuk sementara waktu. Luas wilayah kecamatan Bathin Solapan saat ini adalah 753,47Km² yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Dumai
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tualang Mandau
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandau

Tabel 4.1 Luas wilayah Desa di Kecamatan Bathin Solapan:

No	Desa	Luas wilayah (Km2)	Presentase (%)
1	Tambusai Batang Dui	10	1,32
2	Simpang Padang	25,47	3,31
3	Pematang Obo	20	2,65
4	Balai Makam	45	5,97
5	Petani	80	10,61
6	Air Kulim	60	7,96
7	Buluh Manis	67	8,89
8	Sebangar	66,47	8,82
9	Boncah Mahang	88,53	11,74
10	Kesumbo Ampai	100	13,27
11	Pamesi	76	10,08
12	Bathin Betuah	11	1,45
13	Bumbang	104	13,81
	Jumlah	753,47	100

Sumber: <http://bappeda.bengkaliskab.go.id//2019>.

Berdasarkan luas wilayah 753,47 dan jumlah penduduk sebesar 89.187 jiwa maka akan menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 118 yang artinya dalam setiap 1 km² dihuni sekitar 118 orang.

Secara keseluruhan Kecamatan Mandau terdiri dari 24 desa/ kelurahan yang status hukumnya sudah menjadi desa/ kelurahan defenitif yang dimana jika dilihat dari status pemerintahannya terdiri dari 9 kelurahan yang dipimpin oleh lurah dan 15 desa yang dipimpin oleh kepala desa. Adapun kelurahan yang ada yaitu: Talang Mandi, Gajah Sakti, Batang Serosa, Balik Alam, Duri Barat, Duri Timur, Babussalam, Air Jamban Dan Pematang Pudu. Sedangkan 15 yang berstatus desa yaitu: Harapan Baru, Sebangar, Balai Makam, Petani, Bumbang, Kasumbo Ampai, Bathin Betuah, Boncah Mahang, Tambusai Batang Dui, Simpang Padang, Pematang Obo, Air Kulim, Buluh Manis Pamesi Dan Bathin Sobanga.

Pada awal tahun 2017 tepatnya bulan Maret Kecamatan Mandau mengalami pemekaran wilayah administratif dimana dipecah menjadi 1 Kecamatan baru yaitu Kecamatan Batin Solapan. Dengan terpecahnya kecamatan mandau maka beberapa Desa/Kelurahan yang mulanya berada dalam lingkup administrasi Kecamatan Mandau juga terbagi kedalam 2 kecamatan yakni berada pada lingkup administratif kecamatan Mandau dan Kecamatan Batin Solapan. Adapun desa atau kelurahan yang masuk wilayah administratif kecamatan Mandau Antara lain: Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Betuah, Dan Harapan Baru.

Sedangkan bathin solapan di isi oleh beberapa desa yang masuk kedalam ruang lingkup administratif kecamatan Bathin Solapan antara lain: Desa Air Kulim, Desa Balai Makan, Desa Bathin Sobanga, Desa Boncah Mahang, Desa Buluh Manis, Desa Bumbang, Desa Kesumbo Ampai, Desa Pamesi, Desa Pematang Obo, Desa Petani, Desa Sebangar, Desa Simpang Padang dan Desa Tambusai Batang Dui. Kendati demikian, sampai saat ini segala urusan administratif masyarakat desa yang berada di lingkup kecamatan Batin Solapan masih berada dalam lingkup pemerintahan Kecamatan Mandau. Hal ini disebabkan segala sarana dan prasarana pendukung kecamatan Batin Solapan belum terpenuhi dan masih dalam proses perumusan dan penentuan letak wilayah kecamatan.

Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk Di Kecamatan Bathin Solapan:

No	Desa	RT/RW	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1	Tambusai Batang Dui	25/6	6.501	6.003	12.504	2.411
2	Simpang Padang	34/6	7.052	6.590	13.642	2.436
3	Pematang Obo	23/8	1.657	1.518	3.175	682
4	Balai Makam	42/9	4.819	4.976	9.795	2.017
5	Petani	45/12	3.506	3.045	6.551	1.772

6	Air Kulim	28/6	2.553	2.513	5.066	1.368
7	Buluh Manis	27/7	2.409	2.425	4.837	1.193
8	Sebangar	26/9	4.235	3.878	8.113	1.979
9	Boncah Mahang	28/5	6.017	3.998	8.310	2.013
10	Kesumbo Ampai	16/5	1.734	1.751	3.485	862
11	Pamesi	17/5	1.740	2.325	4.065	813
12	Bathin Betuah	18/4	1.974	2.131	4.105	1.021
13	Bumbang	19/5	2.419	1.418	4.837	1.094
	Jumlah	348/87	46.616	42.571	89.187	19.661

Sumber: <http://bappeda.bengkaliskab.go.id//2019>.

Jumlah penduduk Kecamatan bathin solapan sebesar 89.187 jiwa yang terdiri dari 46.616 jiwa laki-laki dan 42.571 jiwa perempuan. Kecamatan Bathin Solapan memiliki jumlah keluarga sebanyak 19.661 kepala keluarga. Dengan rata-rata jumlah keluarga dalam keluarga adalah empat orang. Jumlah tersebut hampir merata di semua desa. Kecamatan bathin solapan terdiri dari 348 Rukun tetangga (RT) dan 87 Rukun Warga (RW). Adapun Desa yang memiliki jumlah RT yang terbanyak adalah Desa Petani sebanyak 45 RT dan Desa Balai Makan sebanyak 42 RT.

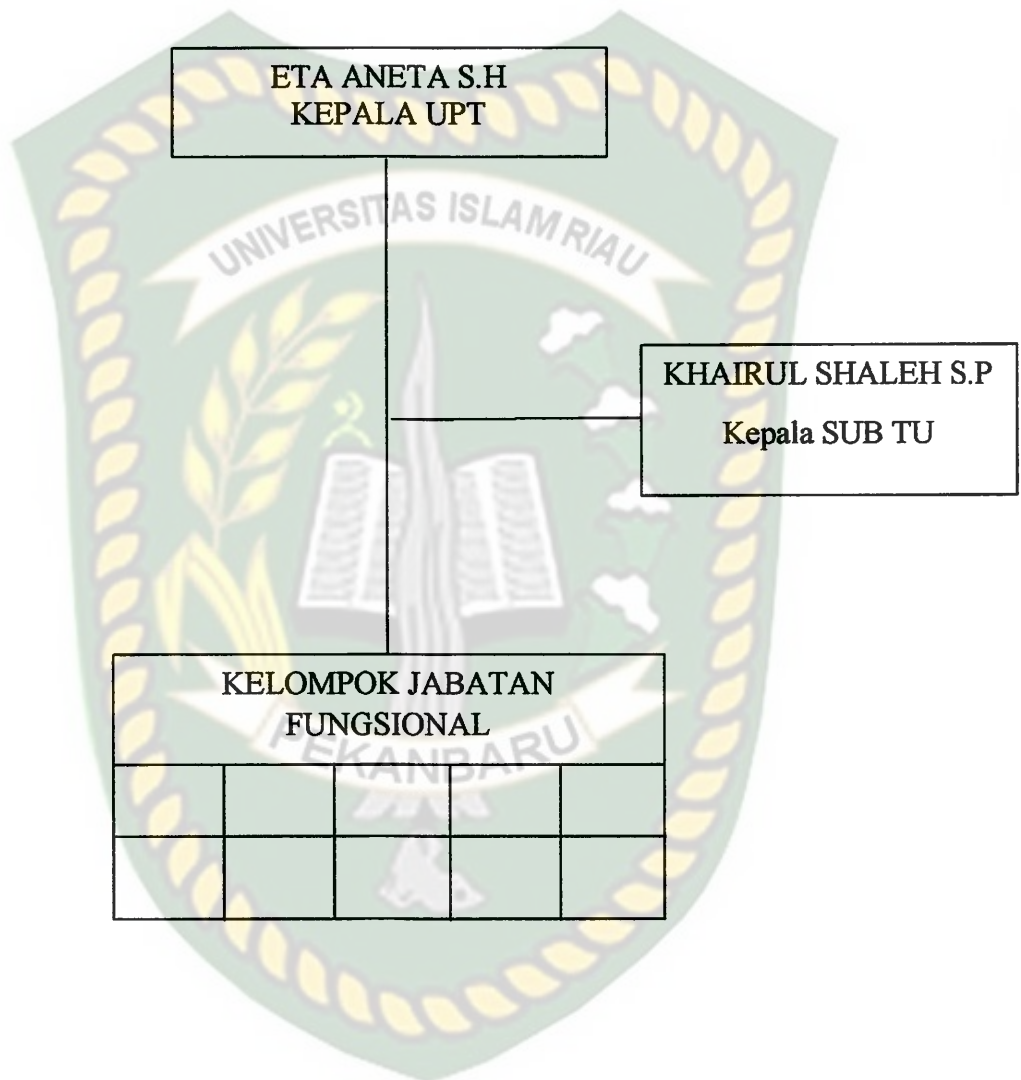
C. Sejarah UPT Balai Penyuluh Pertanian

Sebelum terbentuknya UPT balai penyuluh pertanian, balai penyuluh pertanian (BPP) di pimpin oleh koordinator penyuluh pertanian di tingkat kecamatan karena balai penyuluh pertanian adalah jabatan fungsional, bukan struktural. Pada tahun 2018, barulah ada jabatan struktural untuk penyuluh pertanian dan terbentuklah UPT balai penyuluh pertanian di kecamatan Mandau di kabupaten bengkalis.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor UPT Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Bathin

Solapan



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

E. Tugas Kantor UPT Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Bathin Solapan

Kepala UPT Penyuluh Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penghimpunan data yang berkaitan penyuluhan pertanian di kecamatan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja dinas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan penyuluhan pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan).
- c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi sarana produksi, pembiayaan dan pasar.
- d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraaan pelaku utama dan pelaku usaha.
- e. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metode penyuluhan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan) bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan.
- f. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluh pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan.
- g. Melakukan pembinaan terhadap petani, peternakan maupun masyarakat dalam rangka peningkatan usaha pertanian dan peternakan.
- h. Melakukan pengawasan terhadap petani, peternak maupun masyarakat dalam hal bantuan, pinjaman, dan perizinan di bidang pertanian dan peternakan.

- i. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap aparatur sipil negara dan personil UPT penyuluhan pertanian.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dapat diangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- b. Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- e. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Tata Kerja di Kantor UPT Balai Penyuluh Pertanian sebagai berikut:

1. Kepala UPT dan kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang di pimpinnya.
2. Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan system pengendalian internal di UPT yang di pimpinnya.

F. Visi dan Misi UPT Balai Penyuluh Pertanian

Visi UPT Balai Penyuluh Pertanian

Meningkatkan sumber daya penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha serta mendorong peningkatan produktivitas usaha tani menuju terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan keluarga petani.

Misi UPT Balai Penyuluh Pertanian

1. Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha di tingkat petani dan kelompok tani
2. Mengembangkan penyuluh dengan konsep terpadu, efisien dan peningkatan produktivitas secara berkelanjutan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam penelitian ini digunakan informan sebagai data primer yang diperoleh melalui oleh wawancara. Informan penelitian terdiri dari kantor UPT Balai Penyuluh Pertanian Mandau-Bathin Solapan, Kantor Desa Petani, Kantor Desa Air Kulim, Kantor Desa Buluh Manis, Kelompok Tani, dan Penyuluh Pertanian. Sebelum dibahas mengenai Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, terlebih dahulu kita uraikan identitas informan dalam penelitian ini.

1. Jenis kelamin informan

Jenis Kelamin informan perlu untuk dijelaskan secara rinci. Untuk mengetahui data dan jenis kelamin informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1 Identitas informan berdasarkan jenis kelamin:

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	10	90,9 %
2	Perempuan	1	9,1 %
Jumlah		11	100 %

Sumber: modifikasi penulis 2021

Menurut tabel diatas bahwa dari 11 orang informan, maka yang berada pada jenis kelamin laki laki adalah sebanyak 10 orang atau 91,9 %, sedangkan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 1 orang atau 9,1 %. Berdasarkan data tersebut maka sebagian besar informan adalah jenis kelamin laki-laki.

2. Umur Informan

Umur juga merupakan suatu faktor yang menentukan kebenaran informasi yang sesuai dengan kondisi dan kenyataan untuk pengumpulan data primer penelitian agar data tersebut dapat dinilai valid. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2 Umur Informan:

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	21-30	1	9,1 %
2	31-40	1	9,1 %
3	40-50	1	9,1 %
4	50-60	8	72,7 %
	Jumlah	11	100 %

Sumber: modifikasi penulis 2021

Menurut data dari tabel diatas bahwa dari 11 orang informan maka yang berada pada umur 21-30 tahun sebanyak 1 orang atau 9,1 % informan pada umur 31-40 tahun sebanyak 1 orang atau 9,1 % informan pada umur 41-50 tahun sebanyak 1 orang atau 9,1 % informan pada umur 50-60 tahun sebanyak 8 orang atau 72,7 %. Berdasarkan data tersebut maka sebagian besar informan adalah pada umur 50 tahun keatas. Dengan demikian dari tingkat umur yang beragam ini akan mampu memberikan informasi dan dapat memberikan data yang akurat.

3. Jenis pekerjaan informan

Selain jenis kelamin dan umur informan jenis pekerjaan juga menentukan kebenaran tentang identitas informan. Pekerjaan informan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 5.3 Jenis pekerjaan informan:

No	Jenis pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Pegawai negeri sipil	1	9,1 %
2	Tenaga harian lepas (THL)	1	9,1 %
3	Kepala Desa	3	27,3 %
4	Petani	6	54,5 %
	Jumlah	11	100 %

Sumber: modifikasi penulis 2021

Berdasarkan data diatas terlihat jenis jenis pekerjaan informan adalah pegawai negeri sipil sebanyak 1 orang atau 9,1 % pekerjaan Tenaga Harian Lepas (THL) Sebanyak 1 orang atau 9,1 % pekerjaan kepala desa sebanyak 3 orang atau 27,3 % pekerjaan petani sebanyak 54,5 % .

B. Dimensi Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Berarti, Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ibuk Eta Aneta S.H selaku Selaku Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian diketahui bahwa:

“Menurut saya ini jelas tidak efektif, karena seseorang penyuluh pertanian yang harus mengelola 3 desa sendirian dan banyak yang harus dibinanya, sebaiknya biar efektif dan tugas penyuluh pertanian maksimal, 1 desa 1 penyuluh pertanian saja. Kami sudah mengusulkan kepada dinas agar penyuluh pertanian itu 1 desa 1 penyuluh agar bekerja secara efektif” (wawancara pada tanggal 15 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Ahmad Nazir S.P selaku penyuluh pertanian diketahui bahwa:

“Kalau untuk 3 desa menurut saya tidak efektif, karena dari peraturan kementerian pertanian diwajibkan 1 desa 1 penyuluh agar bekerja secara efektif, dan saya bekerja sangat kewalahan dari jarak tempuh 1 desa ke desa yang lain sangat jauh” (wawancara pada tanggal 19 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Rasikun selaku Kepala Desa Petani diketahui bahwa:

“Kalau menurut saya kinerja penyuluh pertanian sangat bagus, penyuluhnya mudah dihubungi, sosialisasinya bagus, yang saya harapkan penyuluh pertanian nya harus mempunyai jadwal yang tertata agar bisa kelompok tani yang ada di desa petani bisa dibina dapat sosialisasi dari penyuluh nya sendiri” (wawancara pada tanggal 4 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Syahrial S.E selaku Kepala Desa Air Kulim diketahui bahwa:

“Menurut pendapat saya kurang efektif, karena penyuluh pertanian jarang melakukan pembinaan kepada kelompok tani khususnya di desa air kulim, mungkin kerena jarak tempuh yang jauh dan banyaknya kelompok tani yang dibina sehingga penyuluh pertanian jarang terlihat di desa air kulim” (wawancara pada tanggal 10 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Legimun selaku Kepala Desa Buluh Manis diketahui bahwa:

“Menurut pandangan saya, kinerja penyuluh pertanian tidak efektif, karena banyak mengalami kendala, apalagi dalam melakukan pembinaan kepada kelompok tani , alangkah lebih baiknya 1 penyuluh 1 desa agar kelompok tani yang ingin meminta pembinaan kepada penyuluh pertanian tidak ada kendala dan tidak menunggu giliran” (wawancara pada tanggal 3 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Bagi selaku Ketua Kelompok Tani Harapan Jaya di Desa Petani diketahui bahwa:

“Kalau menurut saya kinerjanya bagus, sosialisasinya bagus, sudah cukup efektif lah kinerja penyuluh khususnya di desa petani, tapi yang saya harapkan

jadwalnya tertatalah, misalnya beberapa kali dalam seminggu, agar kami sebagai petani bisa mendapatkan informasi dari pemerintah” (wawancara pada tanggal 4 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Putra selaku Ketua Kelompok Tani

Karya Tani di Desa Petani diketahui bahwa:

“Alhamdulillah, kinerja penyuluh pertanian selama ini selalu mendampingi petani, selalu membantu petani, apapun keluhan petani selalu mendengarkan, apalagi kalau tidak ada penyuluh pertanian kami agak kesusahan” (wawancara pada tanggal 3 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Subagio selaku Ketua Kelompok Tani

Sejati Mulya 2 di Desa Buluh Manis diketahui bahwa:

“Menurut saya kinerja penyuluh pertanian cukup baik, karena semenjak adanya penyuluh pertanian, kami sebagai petani sudah terbantu, tetapi seorang penyuluh yang mengelola 3 desa ini sangat tidak efektif dikarenakan penyuluh pertanian jarang menjumpai petani, sehingga kami para petani jarang mendapatkan sosialisasi dan masukan dari penyuluh pertanian” (wawancara pada tanggal 4 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Samino selaku Ketua Kelompok Tani

Sepakat di Desa Buluh Manis diketahui bahwa:

“Ya kalau kinerja penyuluh pertanian menurut saya baik, karena kami para petani dikasih arahan dan solusi dari penyuluh pertanian, tapi yang kami harapkan penyuluh pertanian lebih fokus di 1 desa karena kami para petani membutuhkan arahan dan solusi tidak menunggu waktu yang lama” (wawancara pada tanggal 10 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Gusli selaku Ketua Kelompok Tani

Mawar B di Desa Air kulim diketahui bahwa:

“kalau tentang penyuluh pertanian, kinerja penyuluh pertanian tidak efektif, karena memang selama ini penyuluh jarang mengontrol ke lapangan, jarang melakukan penyuluhan kepada kelompok tani, mungkin karena seorang penyuluh pertanian yang mengelola 3 desa dan jauhnya jarak tempuh membuat petani lambat untuk mendapatkan binaan dan sosialisasi dari penyuluh pertanian” (wawancara pada tanggal 5 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Baidi selaku Ketua Kelompok Tani Anugrah Alam di Desa Air Kulim diketahui bahwa:

“Ya menurut saya kurang efektif, karena penyuluh pertanian khusus didesa ini jarang ke lapangan, jarang sosialisasi kepada petani, sehingga kami para petani jadi kewalahan karena kurang mendapatkan perhatian dari penyuluh pertanian tersebut” (wawancara pada tanggal 10 februari 2021)

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja penyuluh pertanian kurang efektif, karena dengan mengelola 3 desa seorang diri membuat tidak semua kelompok tani mendapatkan binaan dan arahan dari penyuluh pertanian tersebut, apalagi wilayah binaan yang luas dan jarak tempuh yang jauh membuat kinerja penyuluh pertanian tidak merata dan efektif.

C. Dimensi Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan output dan input berhubungan dengan tercapainya output maksimum dengan sejumlah input, hal ini mengimplikasikan jika rasio output-input besar, maka efisiensi dikatakan semakin tinggi. Efisiensi diartikan sebagai upaya penggunaan input yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan produksi yang sebesar-besarnya. Penggunaan input ini dapat dicari dengan melihat nilai tambahan dari satu-satunya biaya dari input yang digunakan dengan satuan-satuan pembinaan yang dihasilkan.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ibuk Eta Aneta S.H selaku Selaku Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian diketahui bahwa:

“Ya kalau menurut saya SDM petani di kecamatan bathin solapan cukup baik, apalagi teknologi sekarang udah maju, jadi petani mendapatkan ilmu bukan dari penyuluh saja, tetapi bisa buka google, media sosial dan lain-lainnya” (wawancara pada tanggal 15 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Ahmad Nazir S.P selaku penyuluh pertanian diketahui bahwa:

“Sebagian besar SDM petani lumayan cukup baik, karena para petani sudah pandai memakai handphone android, dan para petani sekarang sudah pandai memakai traktor, bukan pakai cangkul lagi jadi sudah cukup maju” (wawancara pada tanggal 19 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Rasikun selaku Kepala Desa Petani diketahui bahwa:

“Kalau menurut saya SDM petani yang ada di desa petani cukup bagus, karena kelompok tani di desa petani pernah mendapatkan juara 3 di kabupaten bengkalis, di bidang budidaya cabe, lomba petani terbaik yang ada di kabupaten bengkalis” (wawancara pada tanggal 4 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Syahrial S.E selaku Kepala Desa Air Kulim diketahui bahwa:

“Menurut pendapat saya, SDM petani di desa air kulim kurang baik, karena banyak petani yang ada didesa air kulim kurang mengerti tentang tata cara yang baik untuk bercocok tanam dan mereka sangat membutuhkan peran dari penyuluh pertanian dan pemerintah” (wawancara pada tanggal 10 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Legimun selaku Kepala Desa Buluh Manis diketahui bahwa:

“Kalau SDM nya karena penyuluh jarang dalam melayani dan melakukan pembinaan petani ya masih kurang, karena banyak petani khususnya di desa buluh manis SDM nya sangat rendah dan sangat dibutuhkan penyuluh untuk mereka, tetapi adalah peningkatan semenjak adanya penyuluh pertanian di desa buluh manis ini” (wawancara pada tanggal 3 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Bagi selaku Ketua Kelompok Tani Harapan Jaya di Desa Petani diketahui bahwa:

“Kalau dengan petani yang sekarang ini kita bandingkan ya cukup baiklah daripada dulu, kalau sekarang sudah terbuka, sesuai dengan komunikasi. Hal ini tidak lepas dari penyuluh pertanian tersebut” (wawancara pada tanggal 4 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Putra selaku Ketua Kelompok Tani

Petani di Desa Petani diketahui bahwa:

“Kalau masalah SDM petani di desa petani ini, bisa di bilang sudah membaik, karena kami para petani mendapatkan bantuan juga dari pemerintah, dan mendapatkan arahan dari penyuluh sehingga petani di disini bisa dibidang lebih berkembang dari tahun-tahun sebelumnya” (wawancara pada tanggal 3 february 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Subagio selaku Ketua Kelompok Tani

Sejati Mulya 2 di Desa Buluh Manis diketahui bahwa:

“Kalau menurut pendapat saya selaku ketua kelompok tani, SDM petani kurang baik, karena banyaknya petani yang kurang mendapat binaan dari penyuluh pertanian, khususnya petani hortikultura. Hal ini yang membuat SDM petani kurang baik, tidak lepas dari peran penyuluh sendiri” (wawancara pada tanggal 4 february 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Samino selaku Ketua Kelompok Tani

Sepakat di Desa Buluh Manis diketahui bahwa:

“Ya kalau masalah SDM di desa buluh manis ini kurang baik, karena mayoritas masyarakat di desa buluh ini petani, jadi kalau dilihat tidak semua petani yang memiliki SDM yang baik karena kurangnya sosialisasi dan binaan dari pemerintah atau penyuluh tersebut” (wawancara pada tanggal 10 february 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Gusli selaku Ketua Kelompok Tani

Mawar B di Desa Air kulim diketahui bahwa:

“Kalau masalah SDM petani nya, kalau dikatakan ya kurang baik, karena minimnya sosialisasi dari penyuluh dan jangkauan yang cukup jauh membuat penyuluh pertanian jarang datang ke lapangan untuk membina kelompok tani” (wawancara pada tanggal 5 february 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Baidi selaku Ketua Kelompok Tani

Anugrah Alam di Desa Air kulim diketahui bahwa:

“Kalau masalah SDM, petani di disini ya masih banyak kurangnya, karena kelompok tani di desa air kulim ini jarang mendapatkan binaan dan sosialisasi dari pemerintah dan penyuluh, mungkin karena jarak tempuh yang jauh membuat tidak

semua kelompok tani tidak mendapatkan binaan dari pemerintah” (wawancara pada tanggal 10 februari 2021)

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa SDM para petani di 3 desa tersebut kurang baik, karena masih banyak nya kelompok tani yang kurang mendapatkan binaan dan sosialisasi dari pemerintah dan penyuluh pertanian sehingga SDM kelompok tani yang ada di desa tersebut kurang baik. Maka dari itu diharapkan 1 penyuluh 1 desa agar para kelompok tani mendapatkan arahan dan binaan dari penyuluh pertanian agar SDM petani di desa tersebut dapat lebih baik dan maju.

D. Dimensi Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan public dapat dikatakan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan atau adquacy berhubungan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah kecukupan masih berkaitan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksikan seberapa jauh alternative yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ibuk Eta Aneta S.H selaku Selaku Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian diketahui bahwa:

“Sarana dan prasarana dari pemerintah akhir-akhir ini banyak bantuan yang diberikan pemerintah kepada kelompok tani, khususnya pada masa politik, bukan hanya dari partai politik, tetapi dari dinas dan pemerintah pusat juga ada membantu. Contohnya pupuk tanaman, alat traktor dan lain-lain” (wawancara pada tanggal 15 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Ahmad Nazir S.P selaku penyuluh pertanian diketahui bahwa:

“Sarana dan prasarana nya bantuannya seperti alat pertanian, tetapi disetiap desa mendapatkan bantuan yang berbeda-beda karena permintaan setiap desa berbeda-beda, tetapi kelompok tani yang mendapatkan bantuan harus membuat proposal terlebih dahulu” (wawancara pada tanggal 19 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Rasikun selaku Kepala Desa Petani diketahui bahwa:

“Kalau sarana dan prasarana, pemerintah desa hanya menyediakan lahan kosong untuk kelompok tani yang ingin bercocok tanam, tetapi kalau bantuan dari pemerintah untuk desa ada, tapi hanya beberapa saja untuk kelompok tani terkhususnya di desa petani ini” (wawancara pada tanggal 4 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Syahrial S.E selaku Kepala Desa Air Kulim diketahui bahwa:

“Kalau di desa air kulim, bantuan dari pemerintah ada beberapa, misalnya seperti traktor, mesin air dan lainnya. Kalau dari pemeritah desa, pemerintah desa tidak ada memberikan bantuan kepada kelompok tani, karena keterbatasan anggaran” (wawancara pada tanggal 10 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Legimun selaku Kepala Desa Buluh Manis diketahui bahwa:

“Kalau sarana dan prasarana dari desa saat ini belum ada, karena keperluan kelompok tani di desa masih bergantung kepada dinas terkait, apalagi karena keterbatasan anggaran, jadi kami belum bisa untuk menganggarkan dana untuk masalah pertanian” (wawancara pada tanggal 3 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Bagi selaku Ketua Kelompok Tani Harapan Jaya di Desa Petani diketahui bahwa:

“Kalau sarana dan prasarana dari pemerintah kabupaten ada, seperti alat pertanian dan bibit tanaman walaupun lama turunnya. Tapi kalau dari pemerintah desa, sampai saat ini belum ada” (wawancara pada tanggal 4 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Putra selaku Ketua Kelompok Tani Karya Tani di Desa Petani diketahui bahwa:

“Kalau sarana dan prasarana dari pemerintah ada beberapa, contohnya alat pertanian, mesin air dan lain-lainnya. Mungkin untuk kedepan ada beberapa yang kami butuhkan untuk para petani dan kami sedang mengajukan proposal kepada pemerintah” (wawancara pada tanggal 3 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Subagio selaku Ketua Kelompok Tani Sejati Mulya 2 di Desa Buluh Manis diketahui bahwa:

“Kalau sarana dan prasana dari pemerintah ada beberapa seperti alat pertanian, tetapi bantuannya sangat lambat. Kalau dari pemerintah desa sampai saat ini belum ada” (wawancara pada tanggal 4 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Samino selaku Ketua Kelompok Tani Sepakat di Desa Buluh Manis diketahui bahwa:

“Kalau sarana dan prasarana dari pemerintah ada, seperti bantuannya seperti alat pertanian walaupun bantuan yang kami ajukan sangat lama turunnya. Tetapi kalau dari pemerintah desa kami mendapatkan bantuan seperti bibit tanaman” (wawancara pada tanggal 10 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Gusli selaku Ketua Kelompok Tani Mawar B di Desa Air kulim diketahui bahwa:

“Sarana dan prasana dari kabupaten ada, seperti alat pertanian. Tetapi yang saya harapkan bantuannya cepat tersalurkan karena kami para petani bisa lebih terbantu karena ada bantuan alat pertanian dari pihak kabupaten. Dari kalau pemerintah desa sampai saat ini belum ada mungkin karena keterbatasan anggaran” (wawancara pada tanggal 5 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Baidi selaku Ketua Kelompok Tani Anugrah Alam di Desa Air kulim diketahui bahwa:

“Kalau sarana dan prasana sudah ada, tapi kurang. Karena kami para petani ini ada banyak kelompok, sedangkan bantuannya sedikit seperti alat pertanian. Jadi kami berharap agar alat pertanian di tambah lagi agar bisa memudahkan petani dalam bercocok tanam” (wawancara pada tanggal 10 februari 2021)

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana dari pemerintah kepada kelompok tani di 3 desa tersebut sudah ada, Cuma masalahnya lambatnya proses mendapatkannya dan terbatas membuat para petani menjadi lama menunggu dan masih menggunakan alat seadanya. Karena dengan lamanya proses mendapatkan bantuan sarana dan prasarana tersebut, membuat proses bercocok tanam petani jadi lambat. Dengan alat pertanian yang terbatas, membuat kelompok tani yang menggunakan alat tersebut harus bergiliran karena alat yang terbatas.

E. Dimensi Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan public dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan public. Kriteria kesamaan atau equity erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ibu Eta Aneta S.H selaku Selaku Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian diketahui bahwa:

“Itu kalau masalah pembagian pupuk subsidi Alhamdulillah sudah dapat semuanya, itu tergantung dengan kelompok tani tersebut apakah sudah mengajukan proposal apa tidak, walaupun hanya terbatas dan lambat keluarnya” (wawancara pada tanggal 15 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Ahmad Nazir S.P selaku penyuluh pertanian diketahui bahwa:

“Kalau masalah pembagian pupuk subsidi tidak merata, karena pupuk subsidi ini tergantung kepada kelompok tani yang mengajukan, tetapi banyak juga kelompok yang tidak mengajukan, apalagi pembagian pupuk subsidi ini sistemnya bertahap tidak sekali turun” (wawancara pada tanggal 19 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Rasikun selaku Kepala Desa Petani diketahui bahwa:

“Kalau untuk desa petani ini sebenarnya tidak semua kelompok tani yang mendapatkan pupuk subsidi ini, karena keterbatasan pupuk subsidi membuat tidak semua kelompok tani yang mendapatkannya. Saya berharap kepada pemerintah kabupaten atau provinsi untuk menambah kouta dan pupuk subsidi ini agar semua kelompok tani di desa petani bisa menikmati pupuk subsidi dari pemerintah” (wawancara pada tanggal 4 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Syahrial S.E selaku Kepala Desa Air Kulim diketahui bahwa:

“Kalau masalah pupuk subsidi ini belum jelas, karena tidak transparansi dari pemerintah kabupaten kepada kelompok tani. Jadi setiap ada pembagian pupuk subsidi, bagusnya kedesa dulu, baru di bagikan oleh pemerintah desa. Untuk saat ini, pihak pemerintah langsung membagikan kepada kelompok tani, jadi pemerintah desa tidak tau jelas pembagiannya kepada kelompok tani” (wawancara pada tanggal 10 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Legimun selaku Kepala Desa Buluh Manis diketahui bahwa:

“Kalau untuk pupuk subsidi, semua kelompok tani belum, tapi kalau sebagian sudah dapat. Karena keterbatasan waktu penyuluh membuat tidak semua kelompok tani mendapatkan informasi tentang bantuan pupuk subsidi, apalagi keterbatasan pupuk subsidi” (wawancara pada tanggal 3 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Bagi selaku Ketua Kelompok Tani Harapan Jaya di Desa Petani diketahui bahwa:

“Kalau masalah pembagian pupuk subsidi kurang efektif, karena sebagian dapat, tetapi sebagian juga tidak mendapatkan bantuan pupuk subsidi karena keterbatasan kouta. Karena petani yang mampu mendapatkan bantuan pupuk subsidi, tetapi petani yang membutuhkan bantuan tidak dapat. Jadi yang saya harapkan perlu di perbaiki lagi dalam system pembagian pupuk subsidi agar tepat sasaran” (wawancara pada tanggal 4 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Putra selaku Ketua Kelompok Tani

Karya Tani di Desa Petani diketahui bahwa:

“Kalau menurut saya masalah pupuk subsidi belum semua kelompok tani mendapatkan bantuan pupuk subsidi, karena dalam pembagian pupuk subsidi banyak terkendalanya dari koperasi dalam pembagian pupuk subsidi. Lagipula pupuk subsidi yang terbatas dan banyaknya kelompok tani membuat tidak semua kelompok tani mendapatkan bantuan pupuk subsidi tersebut” (wawancara pada tanggal 3 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Subagio selaku Ketua Kelompok Tani

Sejati Mulya 2 di Desa Buluh Manis diketahui bahwa:

“Kalau tentang pupuk subsidi semua kelompok tani belum mendapatkan bantuan, karena keterbatasan kouta membuat tidak semua kelompok tani yang mendapatkannya, termasuk saya sendiri” (wawancara pada tanggal 4 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Samino selaku Ketua Kelompok Tani

Sepakat di Desa Buluh Manis diketahui bahwa:

“Kalau masalah pupuk subsidi sebagian dapat, sebagian tidak, karena keterbatasan pupuk subsidi dan tidak meratanya pembagian pupuk subsidi membuat petani yang lahannya terbatas tidak dapat, tetapi petani yang lahan nya lebar mendapatkan bantuan pupuk subsidi. Saya berharap pembagian pupuk subsidi ini adil dan tidak ada factor pilih-pilih petani” (wawancara pada tanggal 10 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Gusli selaku Ketua Kelompok Tani

Mawar B di Desa Air kulim diketahui bahwa:

“Kalau khususnya dari desa air kulim belum, karena keterbatasan pupuk subsidi dan lamanya pengurusan prosedur untuk mendapatkan bantuan pupuk subsidi membuat tidak semua kelompok tani mendapatkan bantuan pupuk subsidi” (wawancara pada tanggal 5 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Baidi selaku Ketua Kelompok Tani

Anugrah Alam di Desa Air kulim diketahui bahwa:

“Menurut saya masalah pembagian pupuk subsidi ya jelasnya masih kurang, karena hanya beberapa kelompok tani yang mendapatkan bantuan, sedangkan yang lain nya tidak dapat. Mungkin karena keterbatasan pupuk subsidi membuat tidak semua kelompok tani yang mendapatkan bantuan tersebut” (wawancara pada tanggal 10 februari 2021)

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak semua kelompok tani yang ada di 3 desa tersebut mendapatkan bantuan pupuk subsidi, karena keterbatasan pupuk subsidi membuat sebagian kelompok tani yang mendapatkan bantuan pupuk subsidi tersebut dan minimnya bantuan pupuk subsidi membuat para petani harus membeli pupuk lagi dari luar karena pupuk bantuan subsidi yang diberikan oleh pemerintah hanya sedikit, sedangkan kebutuhan petani terhadap pupuk subsidi sangatlah banyak.

F. Dimensi Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan pengguna jasa.

Responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Responsivitas dimasukkan dalam salah satu indikator kinerja, karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidaksiharasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ibuk Eta Aneta S.H selaku Selaku Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian diketahui bahwa:

“Kalau menurut saya kurang baik, karena seorang penyuluh yang mengelola 3 desa yang sangat luas jelas tidak efektif dari sisi manapun, dan saya juga sudah berkoordinasi kepada dinas terkait agar kinerja penyuluh diperkecil lagi khususnya di kecamatan bathin solapan” (wawancara pada tanggal 15 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Ahmad Nazir S.P selaku penyuluh pertanian diketahui bahwa:

“menurut saya sendiri tidak baik, karena tidak bisa membina semua kelompok tani dengan baik, apalagi di setiap desa memiliki banyak kelompok tani dan jarak tempuh dari satu desa ke desa lain cukup jauh dan memakan waktu, jadi kalau bisa 1 penyuluh 1 desa agar bisa membina kelompok tani dengan baik” (wawancara pada tanggal 19 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Rasikun selaku Kepala Desa Petani diketahui bahwa:

“Kalau menurut saya sangat bagus, karena selama ini bersinergi dengan pemerintah desa khususnya di desa petani dan dengan kelompok tani yang ada di desa petani ini. Harapan saya penyuluh seharusnya 1 desa 1 penyuluh agar kinerja penyuluh bisa lebih efektif dan lebih fokus ke 1 desa tersebut” (wawancara pada tanggal 4 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Syahrial S.E selaku Kepala Desa Air Kulim diketahui bahwa:

“ya sebenarnya 1 orang 3 desa itu sangat sulit, apalagi jarak desa air kulim sangat jauh dan wilayah nya sangat luas sehingga tidak bisa memenuhi keinginan daripada petani terkhususnya di desa air kulim dan itu membuat kinerja penyuluh pertanian sangat tidak efisien dan efektif” (wawancara pada tanggal 10 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Legimun selaku Kepala Desa Buluh Manis diketahui bahwa:

“Ya kalau dibilang bagus ya tidak bagus, tapikan kita dari desa ini menerima laporan dari pemerintah, jadi ya kami terima aja. Alangkah lebih bagusnya 1 penyuluh 1 desa agar para petani mau berjumpa dan mendapatkan binaan tak ada

kandala dan tidak menunggu giliran dari desa lain” (wawancara pada tanggal 3 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Bagi selaku Ketua Kelompok Tani Harapan Jaya di Desa Petani diketahui bahwa:

“Kalau menurut saya, kinerja penyuluh ini sudah cukup baik, kalau kami ini yang penting jadwal penyuluhnya jelas dan bisa datang ke petani untuk memberi informasi ke petani. Jadi yang kami harapkan dari penyuluh hanya kunjungan ke petani” (wawancara pada tanggal 4 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Putra selaku Ketua Kelompok Tani Karya Tani di Desa Petani diketahui bahwa:

“Kalau menurut saya tidak baik, karena kalau untuk 3 desa sangat banyak, apalagi mayoritas di desa petani itu pekerjaan nya petani, kalau untuk menghubungi penyuluh pertanian untuk datang kedesa sangat lama karena menunggu waktu giliran untuk mendapatkan binaan dan arahan dari penyuluh pertanian tersebut”

Selanjutnya wawancara dengan bapak Subagio selaku Ketua Kelompok Tani Sejati Mulya 2 di Desa Buluh Manis diketahui bahwa:

“Kalau menurut saya kurang baik, karena kami para petani ini sangat lambat mendapatkan binaan dan sosialisasi dari penyuluh pertanian. Saya harap penyuluh ini 1 desa 1 penyuluh supaya kalau kami para petani membutuhkan arahan dan binaan dari penyuluh tidak menunggu lama” (wawancara pada tanggal 4 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Samino selaku Ketua Kelompok Tani Sepakat di Desa Buluh Manis diketahui bahwa:

“Kalau menurut pendapat saya kurang baik, karena penyuluh pertanian yang memiliki wilayah binaan sampai 3 desa dari segi sosialisasi dan binaan kurang ke petani, apalagi kalau menghubungi penyuluh untuk minta pedapat masalah tanaman ya harus menunggu giliran karena wilayah binaan nya sampai 3 desa” (wawancara pada tanggal 10 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Gusli selaku Ketua Kelompok Tani Mawar B di Desa Air kulim diketahui bahwa:

“Ya mungkin jangkauannya sampai 3 desa, menurut saya tidak baik, karena untuk datang ke petani itu sangat lambat, apalagi jarak desa yang sangat jauh, sehingga para petani yang ingin mendapatkan binaan dari penyuluh pertanian itu tidak merata ke seluruh kelompok tani” (wawancara pada tanggal 5 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Baidi selaku Ketua Kelompok Tani

Anugrah Alam di Desa Air kulim diketahui bahwa:

“Kalau menurut saya kurang baik, karena wilayah binaan seorang penyuluh 3 desa membuat penyuluh pertanian kewalahan dalam melakukan sosialisasi dan binaan kepada kelompok tani. Kalau bisa ya 1 penyuluh 1 desa agar kinerjanya lebih bagus dan mempunyai banyak waktu untuk petani” (wawancara pada tanggal 10 februari 2021)

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja penyuluh pertanian tidak baik. Karena luasnya binaan dan jangkauan kinerja penyuluh pertanian membuat tidak semua petani yang mendapatkan arahan dan binaan dari penyuluh pertanian sehingga hampir semua petani ingin 1 penyuluh 1 desa agar para petani tidak menunggu giliran untuk mendapatkan binaan dan arahan dari penyuluh pertanian tersebut sebagai perwakilan dari pemerintah.

G. Dimensi Ketepatan

Tepat berarti sesuai dengan harapan atau keinginan yang dikehendaki. Ketepatan merupakan kemampuan mengarahkan sesuatu dengan sadar kepada obyek yang dikehendaki. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Ketepatan merupakan faktor yang diperlukan seseorang untuk mencapai target yang diinginkan. Ketepatan berhubungan dengan keinginan untuk memberikan arah kepada sasaran dengan maksud dan tujuan tertentu.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ibuk Eta Aneta S.H selaku Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian diketahui bahwa:

“Kami dari dinas sudah membuat beberapa program penyuluhan kepada petani, tetapi para petani khususnya di kecamatan bathin solapan kurang tertarik tentang program yang kami sarankan, apalagi dari pihak dinas kekurangan anggaran sehingga program dari pemerintah tidak berjalan secara efektif dan efisien” (wawancara pada tanggal 15 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Ahmad Nazir S.P selaku penyuluh pertanian diketahui bahwa:

“Program dari dinas dari tahun ke tahun itu-itulah saja, yaitu pajale. Program dari pemerintah saat ini bisa di bilang sedikit terhambat, karena kurangnya pemasaran dan sedikitnya kuota membuat para petani tidak tertarik untuk mengikuti program dari pemerintah, apalagi bibit yang disediakan oleh pihak pemerintah tidak sesuai dengan harapan para petani” (wawancara pada tanggal 19 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Rasikun selaku Kepala Desa Petani diketahui bahwa:

“Kalau menurut saya setiap ada program dari pemerintah, penyuluh sudah menyampaikan program tersebut kepada petani, tetapi program yang disarankan kepada petani tidak sesuai dengan harapan para petani karena prosedur yang rumit dan bibit dari pemerintah tersebut tidak sesuai standar” (wawancara pada tanggal 4 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Syahrial S.E selaku Kepala Desa Air Kulim diketahui bahwa:

“Kalau menurut saya programnya lancar, tapi programnya tersebut tidak tepat sasaran dan tidak disediakan lahan khusus untuk membuat program tersebut. Sehingga para petani di desa air kulim ini kebanyakan membuat lahan pertanian di tanah kosong milik orang lain” (wawancara pada tanggal 10 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Legimun selaku Kepala Desa Buluh Manis diketahui bahwa:

“Kalau menurut saya program dari pemerintah sudah sampai ke para petani, seperti program pajale. Tetapi para petani disini banyak menjalankan program

hanya jagung dan kedelai saja. Karena kurangnya bantuan dana dan lahan membuat para petani tidak mau menanam padi, apalagi karena factor cuaca” (wawancara pada tanggal 3 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Bagi selaku Ketua Kelompok Tani Harapan Jaya di Desa Petani diketahui bahwa:

“Kalau masalah program, program dari pemerintah sudah sampai kepada kami yaitu program pajale. Tapi kurangnya dukungan dari pemerintah membuat para petani sebagian yang menjalankan program tersebut, karena kuakitas bibit yang kurang membuat tanaman yang kami tanam kurang laku di pasaran” (wawancara pada tanggal 4 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Putra selaku Ketua Kelompok Tani Karya Tani di Desa Petani diketahui bahwa:

“Kalau masalah program penyuluh pertanian masih ada, karena kendalanya ada di kelompok petaninya tersebut. Karena bantuan datang, banyak kelompk tani yang tidak siap untuk menjalankan program tersebut dari pemerintah, mungkin karena terkendala lahan atau dana” (wawancara pada tanggal 3 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Subagio selaku Ketua Kelompok Tani Sejati Mulya 2 di Desa Buluh Manis diketahui bahwa:

“Kalau menurut saya program pemerintah tentang pajale sudah sampai, seperti padi, jagung dan kedelai. Tapi karena kurangnya bantuan dana dan bibit yang kurang baik membuat kami para petani tidak mau menjalankan program tersebut” (wawancara pada tanggal 4 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Samino selaku Ketua Kelompok Tani Sepakat di Desa Buluh Manis diketahui bahwa:

“Kalau masalah program sampai ke petani, seperti jagung dan kedelai. Tapi hanya beberapa kelompok tani yang menjalankan program tersebut. Karena kurangnya bibit dan lahan pertanian membuat para petani masih ragu, apalagi kurang sosialisasi dari penyuluh pertanian” (wawancara pada tanggal 10 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Gusli selaku Ketua Kelompok Tani Mawar B di Desa Air kulim diketahui bahwa:

“Ya kalau menurut saya program dari pemerintah sudah sampai, Cuma programnya tidak berjalan dengan baik. Karena tidak disediakan lahan dan bibit yang kurang membuat para petani tidak mau menjalankan program dari pemerintah, apalagi kami para petani ini butuh modal untuk menjalankan program tersebut” (wawancara pada tanggal 5 februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Baidi selaku Ketua Kelompok Tani Anugrah Alam di Desa Air kulim diketahui bahwa:

“Kalau program penyuluh pertanian sudah sampai, tetapi waktu sosialisasi yang kurang membuat para kelompok tani masih ragu dalam program penyuluh pertanian tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya bibit dan dana dari pemerintah membuat para petani masih mikir-mikir dalam hal menjalankan program tersebut” (wawancara pada tanggal 10 februari 2021)

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa program penyuluh pertanian tersebut sudah sampai, tetapi kurangnya sosialisai dari penyuluh terhadap program tersebut membuat para kelompok tani masih berpikir untuk menjalankan program tersebut. Karena sedikitnya bibit dan kurang bagusnya bibit membuat para petani tidak mau menjalankan program tersebut, belum lagi masalah lahan bercocok tanam kepada petani. Jadi harapan petani kepada pemerintah adalah agar disediakan lahan, bibit dan dana agar para petani bisa menjalankan program dari pemerintah dan petani bisa terbantu dari program pemerintah tersebut.

H. Hambatan-Hambatan dalam Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Adapun yang menjadi hambatan-hambatan dalam evaluasi kinerja penyuluh pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani di kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis yaitu:

1. Kurangnya tenaga penyuluh pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani sehingga tidak semua kelompok tani mendapatkan binaan dari penyuluh. Hal ini disampaikan oleh ibu Eta Aneta S.H selaku kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya ini jelas tidak efektif, karena seseorang penyuluh pertanian yang harus mengelola 3 desa sendirian dan banyak yang harus dibinanya, sebaiknya biar efektif dan tugas penyuluh pertanian maksimal, 1 desa 1 penyuluh pertanian saja. Kami sudah mengusulkan kepada dinas agar penyuluh pertanian itu 1 desa 1 penyuluh agar bekerja secara efektif” (wawancara pada tanggal 15 februari 2021)

2. Luasnya wilayah binaan penyuluh pertanian sehingga kinerja penyuluh pertanian tidak efektif dan efisien. Hal ini disampaikan oleh bapak Gusli selaku ketua kelompok tani Mawar B desa Air Kulim yang mengatakan bahwa:

“Ya mungkin jangkauannya sampai 3 desa, menurut saya tidak baik, karena untuk datang ke petani itu sangat lambat, apalagi jarak desa yang sangat jauh, sehingga para petani yang ingin mendapatkan binaan dari penyuluh pertanian itu tidak merata ke seluruh kelompok tani” (wawancara pada tanggal 5 februari 2021)

3. Lambatnya dalam pendistribusian pupuk subsidi sehingga para petani lambat dalam mendapatkan bantuan pupuk subsidi. Hal ini disampaikan oleh bapak Syahrial S.E selaku Kepala Desa Air Kulim yang mengatakan bahwa:

“Kalau masalah pupuk subsidi ini belum jelas, karena tidak transparansi dari pemerintah kabupaten kepada kelompok tani. Jadi setiap ada pembagian pupuk subsidi, bagusnya kedesa dulu, baru di bagikan oleh pemerintah desa. Untuk saat ini, pihak pemerintah langsung membagikan kepada kelompok tani, jadi pemerintah desa tidak tau jelas pembagiannya kepada kelompok tani” (wawancara pada tanggal 10 februari 2021)

4. Terhambat dan ketidakjelasan program penyuluh pertanian kepada kelompok tani sehingga para kelompok tani enggan untuk menjalankan program dari penyuluh pertanian. hal ini disampaikan oleh bapak Baidi selaku ketua kelompok tani Anugrah Alam desa Air Kulim yang mengatakan bahwa:

“Kalau program penyuluh pertanian sudah sampai, tetapi waktu sosialisasi yang kurang membuat para kelompok tani masih ragu dalam program penyuluh pertanian tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya bibit dan dana dari pemerintah membuat para petani masih mikir-mikir dalam hal menjalankan program tersebut” (wawancara pada tanggal 10 februari 2021)

5. Banyaknya kelompok tani yang di bina oleh penyuluh pertanian sehingga kinerja penyuluh pertanian tidak merata dan tidak terbina oleh penyuluh pertanian. Hal ini disampaikan oleh bapak Ahmad Nazir S.P selaku Penyuluh Pertanian yang mengatakan bahwa:

“menurut saya sendiri tidak baik, karena tidak bisa membina semua kelompok tani dengan baik, apalagi di setiap desa memiliki banyak kelompok tani dan jarak tempuh dari satu desa ke desa lain cukup jauh dan memakan waktu, jadi kalau bisa 1 penyuluh 1 desa agar bisa membina kelompok tani dengan baik” (wawancara pada tanggal 19 februari 2021)



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kinerja penyuluh pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani di kecamatan bathin solapan dinilai kurang efektif dan efisien, karena seorang penyuluh pertanian yang harus mengelola 3 desa membuat kelompok tani yang ada di 3 desa tersebut tidak semuanya terbina, apalagi jarak antara 1 desa ke desa lainnya sangat jauh dan wilayah binaannya sangat luas. Kemudian Berdasarkan hasil penelitian maka dapat digeneralisasikan dari beberapa indikator yang dijadikan instrument didalam penelitian, sebagai berikut:

1. Dimensi efektivitas, menyebutkan bahwa kinerja penyuluh pertanian kurang efektif, karena luasnya wilayah binaan membuat penyuluh pertanian kewalahan dalam mengelola 3 desa
2. Dimensi efisiensi, menyebutkan bahwa SDM kelompok tani di 3 desa tersebut kurang baik, karena kurang pengetahuan dari kelompok tani dan kurangnya sosialisasi dari penyuluh pertanian membuat SDM kelompok tani di 3 desa tersebut tidak baik.
3. Dimensi kecukupan, menyebutkan bahwa sarana dan prasarana dari pemerintah ke kelompok tani kurang memadai, karena dengan anggaran yang terbatas membuat kelompok tani hanya sedikit mendapat bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah.
4. Dimensi pemerataan, menyebutkan bahwa pembagian pupuk subsidi di 3 desa tersebut tidak merata, karena masih banyaknya kelompok tani yang tidak

mendapatkan bantuan pupuk subsidi dan terbatasnya kuota untuk mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah.

5. Dimensi responsivitas, menyebutkan bahwa kinerja penyuluh pertanian kurang baik, karena banyaknya kelompok tani yang mau dibina dan luasnya wilayah binaan membuat kinerja penyuluh pertanian tidak maksimal dan jarak tempuh yang jauh membuat penyuluh pertanian susah untuk memberikan pembinaan kepada kelompok tani.
6. Dimensi ketepatan, menyebutkan bahwa keberlangsungan program terhambat dari kurangnya sosialisasi sehingga menyebabkan ketidaktahuan akan program terhadap para kelompok tani

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seharusnya 1 penyuluh 1 desa agar kinerja penyuluh pertanian dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Seharusnya penyuluh pertanian harus sering sosialisasi kepada kelompok tani, agar penyuluh pertanian bisa membantu permasalahan yang dialami oleh para petani.
3. Dalam pendistribusian pupuk subsidi, seharusnya dibagikan secara serentak dan merata, agar tidak ada kecemburuan sosial dari kelompok tani lainnya.
4. Dalam menjalankan program penyuluh pertanian, seharusnya penyuluh pertanian harus berkoordinasi kepada dinas agar ada kejelasan dari program dan bisa membantu petani dalam hal finansial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- C.F Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2011
- Coelli, TJ, DSP Rao, dan G.E. Battese. 1998. *An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis*. Kluwer Academic Publisher, London
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: PusatStudi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM.
- Ermaya Suradinata, *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Gibson, JI, Ivancevich Jm, Donnely Jr. JH, 2003. *Organization*. 8th ed, Boston, Massachusetts: Irwin, Inc.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasibuan M. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta (ID): PT. Toko Gunung Agung.
- Hawkins, H. S., dan A. W. Van Den Ban. 2012. *Penyuluhan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Isran, Noor, 2012. *Buku Pintar Penyuluh Pertanian*. PERHIPTANI (Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia), Jakarta.
- Kaho, J. R. 1997. *Prosepek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kristiani, Wahyu. 2012 *Analisis Pengaruh Efektivitas Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual*. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma*.
- Kusnadi, D. 2011. *Metode Penyuluhan*. Bogor: STPP Press.
- Mangkunegara, Anwar A.A.P. 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia, perusahaan, cetakan kelima*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Maulidah, Silvana. 2012. *Pengantar Manajemen Agribisnis*. Malang: UB Press
- Ndraha, Taliziduhu. 2005 *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta

- Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernology .Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta; PT. Rineka Cipta
- Nicholson, Walter. 2002. *Teori Mikroekonomi Intermediate, Terjemahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurcholis, Hanif. 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Poelje, D.G.A. 1953. *Algemene inleiding tot de bestuurskunde*. Samson N.V.: Alphen aan den Rijn.
- Poerwadarminta W.J.S. 1979. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rosenthal, P.J., 2003, *Review Antimalarial Drug Discovery: Old and New Approaches*, *The Journal of Experimental Biology*, 206, 3735-3744.
- Sajoto. 1988. *Pembinaan Kondisi Fisik Dalam Olahraga*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengadaan Buku pada Lembaga Pengembangan Tenaga Pendidikan. Jakarta.
- Samsudin, S. 2005. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Santoso, Pandji, 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Government*. Bandung: Refika Aditama.
- Sayre, W.S, dalam Inu Kencana Syafie, *Ekologi Pemerintahan*, PT. Pertja, Jakarta, 1998.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekartawi. 2002. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian Teori dan Aplikasi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudjana, Djuju, 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung. PT. Refika Aditama
- Suharno, HP. 1982. *Ilmu Kepelatihan Olahraga*. Bandung. PT. Karya Ilmu.
- Susantun, I. 2000. *Fungsi Keuntungan Cobb-Douglas dalam Pendugaan Efisiensi Ekonomi dan Relatif*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 5(2): 149- 161.
- Syafie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Pemerintatym (edisi revisi)*. Bandung. Mondar Maju.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Syamsuddin, H. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: mLIPPI pres.
- Tangkilisan, Hassel Nogi. S. *Manajemen Publik*. PT. Grasindo, anggota IKAPI. Jakarta. 2005

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.

Van Den Ban. A.W. dan H.S Hawkins. 1999. *Penyuluh Pertanian*. Kanisius. Yogyakarta.

Yusuf, M. 2003. *Pendidikan bagi Anak dengan Problema Belajar*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Jurnal:

Kusuma, Aji Ratna. 2017. "Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur." *Administrative Reform* 5 (2): 112–27.

Mardikanto, T. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

Marliati, Marliati, Sumardjo Sumardjo, Pang S. Asngari, Prabowo Tjitropranoto, dan Asep Saefuddin. 2008. "FAKTOR-FAKTOR PENENTU PENINGKATAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN DALAM MEMBERDAYAKAN PETANI (Kasus di Kabupaten Kampar Provinsi Riau)." *Jurnal Penyuluhan* 4 (2). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v4i2.2174>.

Ompusunggu, Halomuan. 2002. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Akuntansi*, 1 (2), h: 1-9.

Paramita Wendha. 2015. "Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Garuda Indonesia di Denpasar", *Jurnal Universitas Udayana Bali*.

Rauf, R. 2017. "Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan." *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* III (April): 221–32.

Rusadi, Sylvina, Made Devi Wedayanti, dan City Branding. 2019. "Strategi City Branding Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak" V (2): 16–21.

Sapar. 2012. "Jurnal Penyuluhan, Maret 2012 Vol. 8 No.1" 8 (1).

Samual, Nova S, Olvie LS Benu, Gene Kapantow, dan Melisa L.G Tarore. 2011. "Kajian Kinerja Penyuluh Pertanian di Wilayah Kerja Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan."

Samuel, Israel, dan Theodorus Mandas. 2018. "EVALUASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Studi di BKKBN Prov. Sulawesi Utara)." *Jurnal Administrasi Publik* 4 (62): 92–98.

- Suharto, Edi. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Syaifudin, T.M.G. 2017. *Indonesia Kekurangan 28.000 Penyuluh Pertanian*. ekonomi.kompas.com/read/2017/08/09/190000126/indonesia-kekurangan-28.000-penyuluh-pertanian. [01/11/2017].
- Utaminingsih. 2007. "Analisis Efisiensi dan Kinerja TPI di Pantura Timur Jawa Tengah." *Jurnal Dinamika Sosial dan Budaya*, Vol. 9, No.1
- Widiyanto, A., Hikmawan, M. D., & Riswanda, riswanda. (2019). *JSPG: Journal of Social Politics and Governance Implementasi Rencana Aksi Nasional Bela Negara Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Oleh Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. *Journal of Social Politics and Governance*, 1(2), 95–115
- Yuda. 2009. "Evaluasi Peraturan Walikota Denpasar No.09 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern," no. 09.

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009
- Peraturan menteri nomor 03 tahun 2018